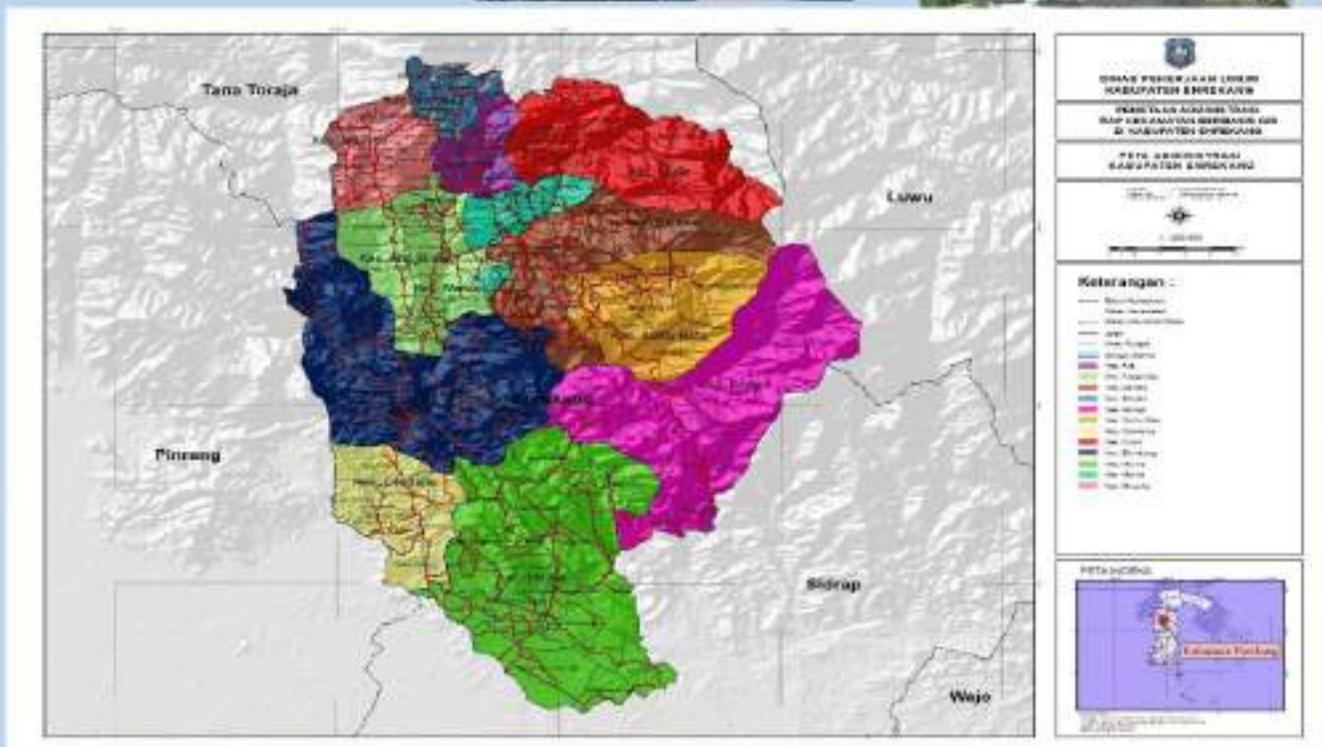


PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI (PPSP) TAHUN 2016



STRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK) KABUPATEN ENREKANG PROPINSI SULAWESI SELATAN



KELOMPOK KERJA SANITASI KABUPATEN ENREKANG

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN ENREKANG
JI. JENDERAL SUDIRMAN NO.3 TLP.(0420) 21222, FAX (0420) 21222 ENREKANG



BUPATI ENREKANG

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberi hidayah dan petunjuk sehingga penyelesaian penyusunan dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten yang lebih dikenal sebagai SSK, merupakan sebuah kerangka kerja yang memuat Strategi Pengembangan Sanitasi tidak hanya dalam hal pengembangan infrastruktur, akan tetapi juga strategi mengenai pengembangan bidang kelembagaan, pembiayaan, dan partisipasi publik dalam rangka mendukung pencapaian visi Kabupaten Enrekang.

Selain berisi penjelasan atas strategi pengembangan sanitasi di kabupaten Enrekang, dokumen ini juga memuat penyusunan prioritas (priority setting) pembangunan sanitasi terutama dalam bidang infrastruktur yang sangat berguna sebagai masukan dalam proses penyusunan rencana kerja tahunan karena memiliki waktu perencanaan yang panjang hingga tahun 2021. Dokumen ini merupakan salah satu dokumen yang penting yang dapat digunakan sebagai masukan dalam penyusunan Renstra SKPD.

Pada kesempatan ini sekali lagi, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Pokja Sanitasi Kabupaten Enrekang yang telah sukses menyelesaikan dokumen SSK ini. Menyadari akan keterbatasan pemikiran dan kemampuan yang ada pada Pokja Sanitasi Kabupaten Enrekang, maka tidak lupa kami mengharapkan adanya saran, masukan dan kritik dari semua pihak yang bersifat konstruktif demi terwujudnya upaya penyempurnaan Dokumen SSK Kabupaten Enrekang yang sama-sama kita banggakan.

Pada akhirnya, sebuah dokumen strategi tidak akan berarti dan bermanfaat apabila tidak menjadi acuan dalam proses pembangunan sebenarnya. Sehingga diharapkan Strategi Sanitasi Kabupaten yang telah kita miliki ini dapat digunakan sebagai salah satu dasar dan acuan bagi SKPD dalam penyusunan kegiatan khususnya bidang sanitasi serta dapat pula digunakan oleh lembaga-lembaga lain yang memiliki inisiatif serta niat untuk bergerak bersama dalam pengembangan sanitasi Kabupaten Enrekang.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Enrekang, Desember 2016

BUPATI ENREKANG,

Drs. H. MUSLIMIN BANDO, M. Pd

LAMPIRAN

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi	iii
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	x
Daftar Peta	xi
Daftar Istilah	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang	01
1.2	Metodologi Penyusunan	04
1.3	Dasar Hukum	06
1.4	Sistematika Penulisan	08

BAB II PROFIL SANITASI SAAT INI

2.1	Gambaran Wilayah	12
2.2	Kemajuan Pelaksanaan SSK	28
2.3	Profil Sanitasi Saat ini	33

BAB III KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI

3.1	Visi dan Misi Sanitasi	81
3.2	Pentahapan Pengembangan Sanitasi	83

3.3	Kemampuan Pendanaan Sanitasi Daerah	105
BAB IV	STRATEGI PENGEMBANGAN SANITASI	
4.1	Air Limbah Domestik	113
4.2	Persampahan	118
4.3	Drainase Perkotaan	123
BAB V	PROGRAM, KEGIATAN, DAN INDIKASI PENDANAAN SANITASI	
5.1	Ringkasan	128
5.2	Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber Pendanaan Pemerintah	129
5.3	Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber Pendanaan DAK	131
5.4	Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber Pendanaan Non Pemerintah	132
5.5	Antisipasi Funding Gap	133
BAB VI	MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN SSK	134

LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Kajian Aspek Non Teknis dan Instrumen Kab. Enrekang

1.1a. Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Enrekang

1.1b Keuangan Daerah

1.2 Instrumen Profil Sanitasi Kabupaten Enrekang

1.3a Ringkasan Eksekutif EHRA

1.3b Ringkasan Eksekutif Kajian Peran Swasta

1.3c Ringkasan Eksekutif Kajian Kelembagaan dan Kebijakan

1.3d Ringkasan Eksekutif kajian Komunikasi dan Media

1.3e Ringkasan Eksekutif Kajian Peran Serta Masyarakat

1.3f Ringkasan Eksekutif Kajian Sanitasi Sekolah

Lampiran 2 Analisis SWOT

Lampiran 3 Matriks KKL

Lampiran 4 Hasil Pembahasan Program dan Kegiatan

Lampiran 5 Deskripsi Program dan Kegiatan

Lampiran 6 Daftar Perusahaan Penyelenggaraan CSR

Lampiran 7 Kesiapan Implementasi Kabupaten Enrekang

Lampiran 8 Rencana Kerja Tahunan Enrekang

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Nama, Luas Wilayah perkecamatan dan Jumlah Desa Perkelurahan	15
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga saat ini dan Proyeksi untuk 5 Tahun kedepan	16
Tabel 2.3	Tingkat Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan saat ini Dan Proyeksi 5 Tahun kedepan	17
Tabel 2.4	Tabel Jumlah Penduduk Miskin Perkecamatan tahun 2015.	19
Tabel 2.5	Tabel Kemajuan Pelaksanaan SSK untuk Air Limbah Domestik.	28
Tabel 2.6	Tabel Kemajuan Pelaksanaan SSK untuk Persampahan...	30
Tabel 2.7	Tabel Kemajuan Pelaksanaan SSK untuk Drainase Perkotaan	32
Tabel 2.8	Cakupan Layanan Air Limbah Domestik Saat ini	37
Tabel 2.9	Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik yang ada di Kabupaten Enrekang	38
Tabel 2.10	Kondisi Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik	44
Tabel 2.11	Permasalahan Mendesak	45
Tabel 2.12	Diagram Sistem Sanitasi Pengolahan Persampahan yang Ada di Kabupaten Enrekang	47
Tabel 2.13	Timbulan Sampah Perkecamatan	56
Tabel 2.14	Cakupan Akses dan Sistem Layanan Persampahan Kecamatan	56

Tabel 2.15	Kondisi Prasarana & Sarana Persampahan	57
Tabel 2.16	Permasalahan Mendesak	59
Tabel 2.17	Diagram Sistem Sanitasi Pengolahan Drainase Lingkungan	62
Tabel 2.18	Sistem Pengolahan Drainase Lingkungan yang ada Di Kabupaten Enrekang	65
Tabel 2.19	Lokasi Genangan dan Luas Genangan	67
Tabel 2.20	Kondisi Sarana dan Prasarana Drainase Perkotaan	68
Tabel 2.21	Permasalahan Mendesak	70
Tabel 2.22	Area Beresiko Sumber Air Berdasarkan Hasil Study EHRA	72
Tabel 2.23	Area Beresiko Perilaku Higiene dan Sanitasi Berdasarkan Hasil Study EHRA	73
Tabel 2.24	Tabel Area Beresiko Sanitasi Air Limbah Domestik	75
Tabel 2.25	Tabel Area Beresiko Sanitasi Persampahan	78
Tabel 2.26	Tabel Area Beresiko Sanitasi Drainase Perkotaan	80
Tabel 3.1	Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten Enrekang	81
Tabel 3.2	Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Kabupaten Enrekang	88
Tabel 3.3	Tahapan Pengembangan Persampahan Kabupaten Enrekang	93
Tabel 3.4	Tahapan Pengembangan Drainase Kab. Enrekang	98
Tabel 3.5	Tujuan dan Sasaran Pengembangan Air Limbah Domestik	100
Tabel 3.6	Tujuan dan Sasaran Pengembangan Persampahan	101
Tabel 3.7	Tujuan dan Sasaran Pengembangan Drainase Perkotaan	103
Tabel 3.8	Skenario Pencapaian Sasaran	105
Tabel 3.9	Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Enrekang untuk Sanitasi	108

Tabel 3.10	Perkiraan Besaran Pendanaan Sanitasi ke Depan	109
Tabel 3.11	Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Enrekang untuk Operasional/Pemeliharaan Sanitasi	110
Tabel 3.12	Perkiraan Besarab Pendanaan APBD Kabupaten Enrekang Untuk Kebutuhan Operasional/Pemeliharaan Aset Sanitasi Terbangun hingga Tahun 2020	111
Tabel 3.13	Perkiraan Kemampuan APBD Kabupaten Enrekang dalam Mendanai Program / Kegiatan SSK	112
Tabel 4.1	Posisi Pengelolaan Komponen Air Limbah Domestik	114
Tabel 4.2	Posisi Pengelolaan Persampahan	118
Tabel 4.3	Posisi Pengelolaan Drainase Perkotaan	124
Tabel 5.1	Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 (lima) Tahun	128
Tabel 5.2	Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 (lima) Tahun Persumber Anggaran	129
Tabel 5.3	Rekapitulasi Dengan Sumber Pendanaan APBD Kabupaten Enrekang	129
Tabel 5.4	Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Provinsi	130
Tabel 5.5	Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBN	131
Tabel 5.6	Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan DAK	131
Tabel 5.7	Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Swasta/CSR	132
Tabel 5.8	Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Masyarakat	132
Tabel 5.9	Funding Gap	133

Strategi Sanitasi Kabupaten Enrekang

Tabel 6.1	Tabel Capaian Statistik	136
Tabel 6.2	Tabel Capaian Kegiatan	146
Tabel 6.3	Tabel Evaluasi	151
Tabel 6.4	Tabel Pelaporan Monev Implementasi SSK	154

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Grafik Input Penyaluran Akhir Tinja	35
Gambar 2.2 Diagram Sistem Sanitasi Air Limbah Domestik	36
Gambar 2.3 Sistem Pengelolaan Limbah Domestik	39
Gambar 2.4 Sistem Pengelolaan Persampahan Di Kabupaten Enrekang	48
Gambar 2.5 Grafik Value Timbulan dan Volume Pengangkutan Sampah	51
Gambar 2.6 Sistem Pengolahan Drainase Lingkungan	63
Gambar 4.1 Posisi Pengelolaan Air Limbah Domestik	117
Gambar 4.2 Posisi Pengelolaan Persampahan	120
Gambar 4.3 Posisi Pengelolaan Drainase Perkotaan	125

DAFTAR PETA

Peta 2.1	Peta Wilayah Kajian SSK	14
Peta 2.2	Peta Rencana Struktur ruang Wilayah	22
Peta 2.3	Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Enrekang	28
Peta 2.4	Peta Cakupan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	42
Peta 2.5	Peta Lokasi Infrastruktur Utama Pengelolaan Air Limbah Domestik	43
Peta 2.6	Peta Cakupan Layanan Pengolahan Persampahan Yang Ada di Kabupaten Enrekang	54
Peta 2.7	Peta Lokasi Infrastruktur Utama Pengolahan Persampahan	55
Peta 2.8	Peta Jaringan Drainase Kota Enrekang	65
Peta 2.9	Peta Potensi Wilayah Genangan Kota Enrekang	66
Peta 2.10	Peta Area Beresiko Sanitasi Air Limbah Domestik	74
Peta 2.11	Peta Area Beresiko Sanitasi Persampahan	77
Peta 2.12	Peta Area Beresiko Sanitasi Drainase Perkotaan	79
Peta 3.1	Peta Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik	63
Peta 3.2	Peta Tahapan Pengembangan Persampahan	67
Peta 3.3	Peta Tahapan Pengembangan Drainase Perkabupaten ...	95
Peta 3.4	Peta Administrasi Kawasan Perkotaan Enrekang	96

DAFTAR ISTILAH

ACAP	: Anti Corruption Action
AMS	: Air Minum dan Sanitasi
APBDes	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
AP-SPAMS	: Asosiasi Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
PPSP	: Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman
Pokja	: Kelompok Kerja
AMPL	: Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
BPS	: Buku Putih Sanitasi
BLM	: Bantuan Langsung Masyarakat
BOP	: Biaya Operasional Program
BPD	: Badan Permusyawaratan Masyarakat
BPKP	: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
BUMD/Des	: Badan Usaha Milik Daerah/Desa
CD	: Community Development
CDD	: Community Driven Development
CLTS	: Community Led Total Sanitation
CMAC	: Central Management Advisory Consultant
CPIU	: Central Project Implementation Unit
CPMU	: Central Project Management Unit
CSR	: Corporate Sosial Responsibility/TanggungJawab Sosial Perusahaan
BLM – OBA	: BLM – Output Based Aid or Approach/BLM Berbasis Pendekatan Kinerja

EA	: Executing Agency
DED/RRK	: Detailed Engineering Design/Rancangan Rinci Kegiatan
Kemen PUPR	: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kemendesa	:Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Kemendagri	: kementerian Dalam Negeri
Kemenkes	: Kementerian Kesehatan
Kemenkeu	: Kementerian Keuangan
DAK	: Dana Alokasi Khusus
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DitPSPAM	: Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
DJCK	: Direktorat Jenderal Cipta Karya
DJPb DepKeu	: Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
DPPHLN Depkeu	: Direktorat Pengelolaan PHLN, Kementerian Keuangan
DPMU	: District Project Management Unit
DRA	: Demand Responsive Approach
SSK	: Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
RPJM	: Rencana Program Jangka Menengah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
Setda	: Sekretaris Daerah
BAPPEDA	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Dinas PU	: Dinas Pekerjaan Umum
Dinkes	: Dinas Kesehatan
BPMPD	: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
SPAL	: Saluran Pembuangan Air Limbah
IPLT	: Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja
IPAL	: Instalasi Pengolahan Air Limbah
WC	: Water Closet
MCK	: Mandi, Cuci, Kakus
MCK+SR	: Mandi, Cuci, Kakus Plus Sambungan Rumah
TPA	: Tempat Pemrosesan Akhir
TPS	: Tempat Pembuangan Sementara
TPST	: Tempat Pengolahan Sampah Terpadu
ITF	: Intermediate Treatment Facility
3R	: Reduce, Reuse, and Recycle
PHBS	: Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
CTPS	: Cuci Tangan Pakai Sabun
ODF	: Open Defecation Free
BABS	: Buang Air Besar Sembarangan
DED	: Detail Engineer Desain
RW	: Rukun Warga
RT	: Rumah Tangga
KK	: Kepala Keluarga
EHRA	: Environmental Health Risk Assessment
ISPA	: Infeksi Saluran Pernapasan Akut
PAMSIMAS	: Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
SANIMAS	: Sanitasi Masyarakat
SPM	: Standar Pelayanan Minimum
FA	: Financing Agreement
FM	: Fasilitator Management

FS	: Fasilitator Senoir
FGD/DKT	: Focused Group Discussion/Diskusi Kelompok terarah
FMR	: Financial Management Report
GA	: Grant Agreement
Gol	: Government of Indonesia
HU	: Hidran Umum
HIK/HID	: Hibah Insentif Kabupaten/Hibah Insentif Desa
HKP	: Hibah Khusus Pamsimas
IBRD	: International Bank for Reconstruction and Development
IDA	: International Development Association
MIS	: management Information System
IFR	: Interim Financial Report
IMAS	: Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi
KPA	: Kuasa Pengguna Anggaran
KPPN	: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
BPSPAMS	: Badan Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
KKM	: Kelompok Keswadayaan Masyarakat, dahulu LKM/BKM
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MBR	: Masyarakat Berpenghasilan Rendah
MDGs	: Millenium Development Goals
MPA	: Methodology for Participatory Assesment
MIS	: Management Information System
NGO	: Non Government Organization
NOL	: No Objection Letter
NPPHLN	: Nota/Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri
OBA	: Output-Based Aid or Approach/BLM Berbasis Kinerja
ODF	: Open Defecation Free

OMS	: Organisasi Masyarakat Setempat
PA/KPA	: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
PAD	: Project Appraisal Document
Pakem	: Panitia Kemitraan
Pamsimas	: Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
P-DTA	: Perlindungan Daerah Tangkapan Air
PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
PHAST	: Participatory Higiene and Sanitation Transformation
PHBS	: Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
PHLN	: Pinjaman/Hibah Luar Negeri
PIU	: Project Implementation Unit
PJM ProAKSI	: Perencanaan Jangka Menengah Program Air Minum, Kesehatan, dan Sanitasi
PMD	: Pemberdayaan Masyarakat Desa
PMM	: Project Management Manual
Pokja AMPL	: Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
POM	: Project Operational Manual
PPK	: Pejabat Pembuat Komitment
PPM	: Penanganan Pengaduan Masyarakat
PPMU	: Provincial Project Management Unit
PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
PPP/PSPM	: Penguji Pembebanan dan Pejabat Penandatanganan SPM
PT/KU	: Public Tap/Kran Umum
RAB	: Rencana Anggaran Biaya
RAD AMPL	: Rencana Aksi Daerah Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
Renstra	: Rencana Strategis
RFP	: Request for Proposal

RISPAM	: Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum
RKA-KL	: Rencana Kerja dan Anggaran kementerian/Lembaga
RKA-SKPD	: Rencana Kerja dan Anggaran – Satuan kerja Perangkat Daerah
RKM/CAP	: Rencana Kerja Masyarakat/Community Action Plan
RKPD/Des	: Rencana Kegiatan Pemerintah daerah/Desa
RKT/AWP	: Rencana Kerja Tahunan /Annual Work Plan
ROMS	: Regional Oversight Management Services
RPAM	: Rencana Pengamanan Air Minum
RPIJM	: Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah
RPJM	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RRK	: Rencana Rinci Kegiatan
SA	: Special Account (Rekening Khusus)
Satker	: Satuan Kerja
SBS	: Stop Buang Air Besar Sembarangan
SDM	: Sumber Daya Manusia
SE-DJP Kemenkeu	: Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
SIM	: Sistem Informasi Management
SOE	: Statement of Expenditure
SOP/POB	: Standard Operational Procedures/Prosedur Operasional Baku
SP2D	: Surat Perintah Pencairan Dana
SP3K	: Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan
SPAM	: Sarana Penyediaan Air Minum
SPK	: Surat Perintah Kerja
SPKMK	: Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Kegiatan
SPM	: Surat Perintah Membayar
SPPB	: Surat Perjanjian Pemberian Bantuan

SR	: Sambungan Rumah
STBM	: Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
TDS	: Training Development Services
TFM	: Tim Fasilitator Masyarakat
TOR/KAK	: Terms of References / Kerangka Acuan Kerja
Tupoksi	: Tupoksi Pokok dan Fungsi
WB	: World Bank
VIM	: Village Implementation Manual
Wusan	: Wira Usaha Sanitasi
UA Tahun 2019	: Akses Universal Air Minum dan Sanitasi Tahun 2019/Akses Universal (100%) Tahun 2019
UMKM/KUR	: Usaha Menengah Kecil Masyarakat/Kredit Usaha Rakyat
UPM	: Unit Pengaduan Masyarakat

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sanitasi sebagai salah satu aspek pembangunan memiliki fungsi penting dalam menunjang tingkat kesejahteraan masyarakat, karena berkaitan dengan kesehatan, pola hidup, kondisi lingkungan permukiman serta kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Sanitasi seringkali dianggap sebagai urusan sekunder, sehingga sering terpinggirkan dari urusan urusan yang lain, namun seiring dengan tuntutan peningkatan standart kualitas hidup masyarakat, semakin tingginya tingkat pencemaran lingkungan dan keterbatasan daya dukung lingkungan itu sendiri menjadikan sanitasi menjadi salah satu aspek pembangunan yang harus diperhatikan. Masih sering dijumpai bahwa aspek-aspek pembangunan sanitasi, yaitu air limbah, persampahan dan drainase dilengkapi dengan penyediaan air bersih, masih berjalan sendiri-sendiri. Masih terdapat pelaksanaan pembangunan sanitasi yang berjalan secara parsial dan belum terintegrasi dalam suatu grand design yang sifatnya integratif dan memiliki sasaran secara menyeluruh serta jangka waktu yang lebih panjang. Hal tersebut dapat dilihat dari aspek jenis kegiatannya maupun dari aspek kewilayahan. Untuk itu perlu disusun suatu perencanaan sanitasi secara lebih integratif, aspiratif, inovatif dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

Salah satu upaya memperbaiki kondisi sanitasi adalah dengan menyiapkan sebuah perencanaan pembangunan sanitasi yang responsif dan berkelanjutan. Terkait dengan hal itu pemerintah mendorong kabupaten/kota untuk menyusun Strategi Sanitasi Perkotaan (SSK) yang memiliki prinsip (1) berdasarkan data aktual (2) berskala kota (3) disusun sendiri oleh kota: dari, oleh, dan untuk kota (4) menggabungkan pendekatan bottom-up dan top-down. Untuk menghasilkan SSK yang demikian, kabupaten/kota harus mampu memetakan situasi sanitasi wilayahnya, pemetaan situasi sanitasi (Buku Putih Sanitasi) yang baik hanya bisa dibuat apabila kota - kota/kabupaten mampu mendapatkan informasi lengkap, akurat, dan mutakhir tentang kondisi sanitasi, baik menyangkut aspek

teknis maupun non teknis. dalam konteks ini Buku Putih merupakan prasyarat utama dan dasar bagi penyusunan SSK. Strategi Sanitasi Kabupaten adalah dokumen rencana strategis berjangka menengah yang disusun untuk percepatan pembangunan sektor sanitasi suatu Kabupaten, yang berisi potret kondisi sanitasi kota saat ini, rencana strategi dan rencana tindak pembangunan sanitasi jangka menengah.

SSK disusun oleh Pokja Sanitasi Kabupaten didukung fasilitasi dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Untuk menghasilkan SSK yang demikian, kabupaten harus mampu memetakan situasi sanitasi wilayahnya. Pemetaan situasi sanitasi yang disusun dalam Buku Putih Sanitasi yang baik hanya bisa dibuat apabila kota-kota/kabupaten mampu mendapatkan informasi lengkap, akurat, dan mutakhir tentang kondisi sanitasi, baik menyangkut aspek teknis maupun non teknis.

Dengan melihat kondisi tersebut, maka Kabupaten Enrekang melalui Pokja AMPL yang tergabung dalam SK Pokja PKP tahun 2021 juga melakukan percepatan pembangunan sanitasi melalui Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) dengan menyusun Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten. Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Enrekang disusun sebagai acuan dalam penyusunan rencana pembangunan sanitasi dan dijadikan sebagai pedoman pembangunan sanitasi di Kabupaten Enrekang selama kurun waktu 5 tahun Strategi Sanitasi Kota memuat gambaran visi, misi, tujuan dan sasaran sektor sanitasi Kabupaten Enrekang dan kebijakan pembangunan Sanitasi Kabupaten Enrekang jangka menengah Sebagai dasar penentuan kebijakan bagi para pemangku kepentingan di Kabupaten Enrekang dalam merumuskan dan menentukan strategi, tahapan dan arahan kegiatan dalam pembangunan sanitasi di Kabupaten Enrekang. Pedoman bagi para pelaku pembangunan khususnya pembangunan sanitasi di Kabupaten Enrekang terutama pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, masyarakat serta pihak swasta untuk berperan aktif dalam mendukung pembangunan sanitasi di Kota Kabupaten Enrekang. Tahun 2012 Kabupaten Enrekang bergabung dalam Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) dan telah menyusun dokumen BPS dan SSK pada tahun

2016 sebagai acuan dasar pembangunan sektor sanitasi selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Kemudian di tahun 2013 menyusun dokumen MPS dimana beberapa program dan kegiatan yang ditargetkan telah diimplementasikan secara bertahap sehingga menambah cakupan layanan sanitasi kabupaten. Pada tahun 2022 dilakukan revisi Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahun kedepan yang disusun untuk memberikan arah pengembangan sanitasi Kabupaten Enrekang. Pemutakhiran dokumen SSK di kabupaten Enrekang perlu dilakukan karena beberapa hal yaitu periode pelaksanaan yang tercantum dalam dokumen SSK telah berakhir masa berlakunya, perlunya penyesuaian karena perubahan RPJMD dan peningkatan kualitas dokumen SSK sebelumnya karena ketidaklengkapan data. Konsep Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) dimulai dengan Strategi SSK yaitu Pemetaan Kondisi Eksisting, Rencana Pengembangan Sanitasi, Indikasi Kebutuhan dan Biaya, Pemantauan dan Evaluasi yang disusun berdasarkan Panduan Fasilitasi Pembangunan Sanitasi Permukiman dan Outline Penyusunan dan Pemutakhiran SSK tahun 2020. Kondisi Sanitasi Eksisting telah mencapai 100% Akses Sanitasi Kabupaten Enrekang yaitu Akses Layak 95% dengan akses aman 7%, Akses Dasar 5%.

Target Pembangunan Sanitasi Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Undang undang no 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah, dapat dilihat pada sector :

1. Air Limbah

Tingkat Nasional Akses Sanitasi layak sebesar 90% dan Sanitasi Aman sebesar 15% sedangkan Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Akses Sanitasi Layak sebesar 95% dan Sanitasi Aman sebesar 8%.

2. Persampahan

- Untuk Tingkat Nasional, Penanganan Sampah Sebesar 80% dan Pengurangan Sampah sebesar 20%.
- Untuk Tingkat Provinsi, Penanganan Sampah sebesar 83% dan Pengurangan sampah sebesar 17%.

3. Drainase, Penanganan Kawasan Prioritas Genangan.

Dalam rangka pencapaian target pelayanan dasar tersebut, Pemerintah daerah Kabupaten Enrekang mendukung upaya pemerintah pusat dalam memenuhi Kebijakan Bidang Sanitasi terkait Sistem Layanan Sanitasi Berkelanjutan sebagaimana tercantum juga dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 – 2024 yang mengamanatkan sebagai berikut :

1. Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi layak dan aman sebesar 90 % layak (termasuk 15 % aman).
2. Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka 0%.
3. Rumah Tangga di perkotaan terlayani pengelolaan sampah yang baik sebesar 100%.
4. Tersedianya layanan sanitasi dan air minum yang terintegrasi di Kabupaten/Kota prioritas. 100% Akses Layak, 40% Akses Aman
5. Target Penanganan Kumuh adalah 690,37 ha Kawasan kumuh.

Dengan mengacu kepada dokumen SSK tersebut, Pemerintah Kabupaten Enrekang dapat mengalokasikan anggaran untuk peningkatan akses air minum dan sanitasi untuk mencapai universal access air minum dan sanitasi Tahun 2026 serta untuk pendanaan pembangunan sanitasi permukiman sesuai kebutuhan. Sesuai peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi pada Pasal 42 menyatakan bahwa pendanaan APBD Kab/kota untuk percepatan penyediaan sanitasi diselenggarakan berdasarkan kepada program dan kegiatan penyediaan air minum yang tercantum dalam RKPD Kabupaten/Kota yang mengacu pada SSK. Maksud penyusunan Pemutahiran Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) adalah tersusunnya dokumen perencanaan Strategis Sanitasi Kabupaten Enrekang yang dapat dijadikan rujukan perencanaan pembangunan Sanitasi Kabupaten Enrekang dalam jangka menengah (5 tahun). Tujuan dari penyusunan dokumen kerangka kerja pemutahiran Strategi Sanitasi Kabupaten Enrekang ini adalah:

1. Tujuan Umum Kerangka kerja Pemutahiran Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) ini disusun sebagai rencana pembangunan sektor sanitasi dan dijadikan sebagai pedoman pembangunan sanitasi Kabupaten Enrekang mulai Tahun 2022 hingga Tahun 2026
2. Tujuan Khusus :
 - Kerangka kerja Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) ini dapat memberikan gambaran tentang arah kebijakan pembangunan Sanitasi Kabupaten Enrekang selama 5 tahun yaitu Tahun 2022 hingga Tahun 2026
 - Dipergunakan sebagai dasar penyusunan strategi dan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan, serta penyusunan program jangka menengah dan tahunan sektor sanitasi.
 - Dipergunakan sebagai dasar dan pedoman bagi semua pihak (instansi, masyarakat dan pihak swasta) yang akan melibatkan diri untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan sanitasi Kabupaten Enrekang.

1.2. METODOLOGI PENYUSUNAN

Metodologi Dalam menyusun SSK, Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota berpedoman pada prinsip: a. Berdasarkan data aktual (Buku Putih Sanitasi); b. Berskala kota dan lintas sektor (air limbah, drainase, persampahan); c. Disusun sendiri oleh kota dan untuk kota; dan d. Menggabungkan pendekatan top down dengan bottom up Metode yang digunakan dalam penyusunan SSK ini menggunakan beberapa pendekatan dan alat bantu, secara bertahap untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang lengkap.

Metode penyusunan SSK ini, terdiri dari tahapan-tahapan berikut ini: Menetapkan kondisi pengelolaan sanitasi saat ini dan kondisi sanitasi yang diinginkan Kabupaten Enrekang ke depan yang dituangkan kedalam visi, misi sanitasi kota, serta tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi kota. Dalam perumusannya mengacu pada Buku Putih Sanitasi (BPS), Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD), Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM), Renstra PD, dan dokumen perencanaan lainnya yang ada di Kabupaten Enrekang. Menilai kesenjangan antara kondisi pengelolaan sanitasi saat ini dengan kondisi yang diinginkan. Analisis kesenjangan ini digunakan untuk mendiskripsikan isu strategis dan kendala sektor sanitasi yang mungkin akan dihadapi dalam mencapai tujuan.

Jenis data yang digunakan dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten Enrekang adalah: 1. Data Primer yakni data yang diperoleh dari survei lapangan, interview dengan narasumber. 2. Data sekunder yakni data yang diperoleh dengan melakukan kajian terhadap dokumen-dokumen strategis daerah antara lain RTRW, RPJMD, RPJPD, RPIJM, APBD, Kabupaten Enrekang Dalam Angka, Renstra PD, dan data dokumen pendukung lainnya seperti aturan-aturan baik dari pusat, provinsi dan kota. Teknik Pengumpulan Data menggunakan berbagai teknik antara lain : Kajian Literatur, data sekunder Observasi, wawancara responden FGD dan indepth interview Studi spesifik: Kesadaran masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, jender dan kemiskinan (PMJK), Pemetaan media, Partisipasi dunia usaha, Pendanaan dan pembiayaan, Kelembagaan. Studi Environmental Health Risk Assesment (EHRA) Proses Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten Enrekang Sebagai bagian dari proses, maka penyusunan dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Enrekang mengikuti langkah- langkah antara lain: Pengkajian Fakta Sanitasi Penyusunan Visi dan Misi Sanitasi Kota.

1.3. DASAR HUKUM

Implementasi perencanaan dan pembangunan sanitasi di Kabupaten Enrekang berlandaskan kepada berbagai peraturan baik yang menjadi kebijakan di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Peraturan dan regulasi ini menjadi bagian dari landasan perencanaan dan pembangunan sektor sanitasi di Kabupaten Enrekang baik yang bersifat mutlak maupun yang bersifat normatif. Adapun peraturan yang menjadi kebijakan dan acuan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
- 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 8 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional Tahun 2020-2024. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883), Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);

- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 13 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 725), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1000);
- 14 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 8);

- 16 Peraturan Bupati Nomor 163 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2021 Nomor 163);
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Enrekang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 2)
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2019 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2021 Nomor 4);

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) ini adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. **Latar Belakang.** Berisi gambaran latar belakang dilakukannya pemutakhiran dokumen SSK yang meliputi; i) peran SSK dalam pembangunan sanitasi di Kabupaten, ii) pentingnya memiliki dokumen SSK yang berkelanjutan, iii) hubungan antara SSK yang disusun sebelumnya dengan SSK yang telah dimutakhirkan serta kaitannya dengan dokumen perencanaan daerah, serta iv) target akses universal bidang sanitasi.

- 1.2. **Metodologi Penyusunan.** Berisi informasi terkait metodologi yang digunakan oleh Pokja dalam proses pemutakhiran SSK
- 1.3. **Dasar Hukum.** Berisi informasi terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku (Nasional dan daerah) yang menjadi dasar dalam penyusunan dokumen pemutakhiran SSK.
- 1.4. **Sistematikan Penulisan.** Berisi penjelasan sistematikan yang digunakan dalam penulisan dokumen yang berisi rincian bab yang dituliskan serta penjelasan isi dari setiap babnya.

BAB II. PROFIL SANITASI SAAT INI

- 2.1. **Gambaran Wilayah.** Berisi penjelasan singkat mengenai kondisi administratif, wilayah kajian SSK, kependudukan, jumlah penduduk miskin, kebijakan penataan ruang beserta peta dan tabel.
- 2.2. **Kemajuan Pelaksanaan SSK.** Berisi penjelasan singkat mengenai status implementasi SSK periode terdahulu untuk 3 sub sektor yakni air limbah domestik, pengelolaan persampahan dan drainase perkotaan.
- 2.3. **Profil Sanitasi Saat Ini.** Berisi penjelasan singkat mengenai sistem air limbah domestik, persampahan dan drainase perkotaan saat ini serta cakupan layanannya termasuk rencana pengembangannya.
- 2.4. **Area Beresiko dan Permasalahan Mendesak Sanitasi.** Berisi penjelasan singkat mengenai pemetaan area beresiko untuk air limbah domestik, persampahan dan drainase perkotaan saat ini serta permasalahan mendesak yang dihadapi.

BAB III. KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI

- 3.1. **Visi dan Misi Sanitasi.** Berisi penjelasan singkat mengenai visi dan misi sanitasi yang telah dimutakhirkan sesuai RPJM Kabupaten

- 3.2. **Pentahapan Pengembangan Sanitasi.** Berisi penjelasan singkat mengenai; i) tahapan pengembangan sanitasi (Sistem dan Zonasi, ii) tujuan dan sasaran sanitasi, dan iii) skenario pencapaian sasaran.
- 3.3. **Kemampuan Pendanaan Sanitasi Daerah.** Berisi hasil pemutakhiran atas hasil perhitungan kemampuan pendanaan sanitasi untuk 5 (Lima) tahun kedepan.

BAB IV. STRATEGI PENGEMBANGAN SANITASI

- 4.1. **Air Limbah Domestik.** Berisi penjelasan singkat mengenai pernyataan strategi yang akan dilaksanakan untuk pengembangan pengelolaan air limbah domestik selama Lima tahun mendatang berdasarkan isu strategis yang ada saat ini.
- 4.2. **Pengelolaan Persampahan.** Berisi penjelasan singkat mengenai pernyataan strategi yang akan dilaksanakan untuk pengembangan pengelolaan persampahan selama Lima tahun mendatang berdasarkan isu strategis yang ada saat ini.
- 4.3. **Drainase Perkotaan.** Berisi penjelasan singkat mengenai pernyataan strategi yang akan dilaksanakan untuk pengembangan drainase perkotaan selama Lima tahun mendatang berdasarkan isu strategis yang ada saat ini.

BAB V. PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN SANITASI

- 1.1. **Ringkasan.** Berisi penjelasan singkat mengenai ringkasan kebutuhan investasi pengembangan sanitasi (air limbah domestik, persampahan dan drainase) Lima tahun kedepan baik berdasarkan sumber anggaran APBD Kabupate, APBD Provinsi, APBN maupun PHLN.
- 1.2. **Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber Pendanaan Pemerintah.** Berisi penjelasan singkat mengenai rekapitulasi program kegiatan sanitasi yang didanai dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, DAK dan APBN untuk Lima tahun kedepan.
- 1.3. **Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber Pendanaan Non Pemerintah.**

Berisi penjelasan singkat mengenai rekapitulasi program kegiatan sanitasi yang didanai dari non pemerintah (kontribusi swasta, BUMN/D, kontribusi masyarakat) untuk Lima tahun kedepan.

- 1.4. **Antisipasi Funding Gap.** Berisi penjelasan singkat mengenai kemungkinan terjadinya Funding gap bila jumlah anggaran yang dibutuhkan jauh lebih besar dari pada yang tersedia.

BAB VI. MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN SSK

Memuat penjelasan mekanisme monitoring dan evaluasi implementasi SSK Lima tahun kedepan sesuai rencana dan terget capaian yang telah ditentukan.

BAB 2 PROFIL SANITASI SAAT INI

2.1. Gambaran Wilayah

Kabupaten Enrekang secara geografis terletak antara 3° 14'36"- 3° 50'00" Lintang Selatan dan antara 109° 40'53" - 110° 6'33" Bujur Timur. Sedangkan ketinggiannya bervariasi antara 47 meter sampai 3.329 meter di atas permukaan laut. Letak geografis Kabupaten Enrekang berada di Jantung Jasirah Sulawesi Selatan yang dalam peta batas wilayah memang bentuknya seperti jantung. Batas wilayah Kabupaten Enrekang adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Tana Toraja
- Sebelah Timur : Kabupaten Luwu
- Sebelah Selatan : Kabupaten Sidrap
- Sebelah Barat : Kabupaten Pinrang

Luas wilayah kabupaten ini adalah 1.786,01 km² atau sebesar 2,83 persen dari luas Propinsi Sulawesi Selatan. Wilayah ini terbagi menjadi 12 kecamatan dan secara keseluruhan terbagi lagi dalam satuan wilayah yang lebih kecil yaitu terdiri dari 129 wilayah desa/kelurahan. Jumlah penduduk Kabupaten Enrekang pada tahun 2021 adalah sebanyak 225.172 jiwa dengan kepadatan penduduk Kabupaten Enrekang mencapai 126,08 persen. Mayoritas penduduk Kabupaten Enrekang atau hampir sebesar 99,68 persen menganut agama Islam. Topografi Wilayah Kabupaten Enrekang ini pada umumnya mempunyai wilayah Topografi yang bervariasi berupa perbukitan, pegunungan, lembah dan sungai dengan ketinggian 47 - 3.293 m dari permukaan laut serta tidak mempunyai wilayah pantai. Secara umum keadaan Topografi Wilayah wilayah didominasi oleh bukit-bukit/gunung-gunung yaitu sekitar 84,96% dari luas wilayah Kabupaten Enrekang sedangkan yang datar hanya 15,04%. Penggunaan lahannya didominasi oleh kawasan hutan dan sisanya berupa tanah bangunan, sawah, tegal/kebun, ladang/huma, padang rumput, rawa-rawa, kolam, perkebunan dan areal peruntukan

lainnya. Pada umumnya jenis tanahnya bervariasi, terdiri dari tanah podsolik coklat dan merah kuning dengan tekstur liat berpasir, struktur remuk, konsistensi gembur permeabilitas sedang. Keadaan tersebut menjadikan Enrekang sebagai daerah yang subur dan menjadi pusat produksi hasil pertanian dataran tinggi di Provinsi Sulawesi Selatan dan Kawasan Indonesia Timur. Musim yang terjadi di Kabupaten Enrekang ini hampir sama dengan musim yang ada di daerah lain yang ada di Propinsi Sulawesi Selatan yaitu musim hujan dan musim kemarau dimana musim hujan terjadi pada bulan November - Juli sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Agustus - Oktober.

Wilayah kajian SSK seluruh wilayah administrasi Kabupaten Enrekang, dapat dilihat pada Peta 2.1 berikut.

Peta. 2.1

Peta wilayah Kajian SSK Kab. Enrekang

Sumber : RTRW Kabupaten Enrekang Tahun 2011-2031

Secara administratif, Kabupaten Enrekang terdiri dari 12 Kecamatan, 112 Desa dan 17 Kelurahan. Adapun Jumlah Penduduk, Jumlah Kelurahan/Desa dan Luas Wilayah Perkecamatan diperlihatkan pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk, Jumlah Kelurahan/Desa dan Luas Wilayah Perkecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa		Luas Terbangun (km ²)	Jumlah Penduduk(Jiwa)		Jml Rumah Tangga		Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
		Perdesaan	perkotaan		Perdesaan	perkotaan	Perdesaan	perkotaan	
1	Maiwa	21	1	5.893	24.208	3.672	6.014	918	4,33
2	Bungin	6	0	3552,6	5.508	-	1.379	-	1,26
3	Enrekang	12	6	4367,85	18.438	18.642	4.614	4.663	7,53
4	Cendana	7	0	1365,15	9.935	-	2.484	-	6,48
5	Baraka	12	3	2387,4	16.990	6.549	4.252	1.639	9,62
6	Buntu Batu	8	0	1899,75	15.248	-	3.816	-	7,35
7	Anggeraja	12	3	1880,1	18.599	9.869	4.655	2.469	13,83
8	Malua	7	1	605,4	7.345	1.809	1.840	453	13,90
9	Alla	5	3	519,9	15.103	9.013	3.778	2.254	43,99
10	Curio	11	0	2677,65	17.816	-	4.458	-	6,56
11	Masalle	6	0	1025,25	14.612	-	3.655	-	14,03
12	Baroko	5	0	616,05	11.816	-	2.955	-	20,18
	Jumlah	112	17	26.790	175.618	49.554	43.900	12.396	7,83

Sumber: Buku Kabupaten Enrekang Dalam Angka Tahun 2021

Dalam konteks tata ruang, secara umum penataan ruang di Kabupaten Enrekang bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Enrekang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan sebagai Daerah Agropolitan yang mandiri, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam rangka optimalisasi potensi sumber daya alam melalui inovasi dan pengembangan sumber daya manusia menuju Kabupaten Enrekang yang Maju dan Mandiri.

Kebijakan penataan ruang wilayah Daerah, terdiri atas:

1. Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah kabupaten secara merata dan berhierarki.
2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Enrekang.
3. Penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung yang meliputi hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan cagar alam, kawasan rawan bencana, kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya.
4. Peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan.
5. Pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan.
6. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana.
7. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi sistem ekologi wilayah.
8. Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.
9. Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya.
10. Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
11. Pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan

kawasan, melestarikan keunikan rona alam, dan melestarikan warisan ragam budaya lokal.

12. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian Kabupaten yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional atau internasional.
13. Pemanfaatan sumberdaya alam dan atau perkembangan Iptek secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
14. Pelestarian dan peningkatan kualitas sosial dan budaya lokal yang beragam.
15. Pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi budaya antar kawasan.

Penyusunan RTRW Kabupaten Enrekang ini didasarkan pada upaya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten, antara lain meliputi perwujudan ruang wilayah Kabupaten yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan serta perwujudan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah, yang diterjemahkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten. Rencana peruntukan untuk pusat-pusat kegiatan dapat dikelompokkan antara lain : PKL, PKLp, PPK dan PPL. Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:115.000, sebagaimana pada Peta 2.2. berikut.

Struktur ruang wilayah Kabupaten mencakup sistem pusat perkotaan Kabupaten, sistem jaringan transportasi Kabupaten, sistem jaringan energi Kabupaten, sistem jaringan telekomunikasi Kabupaten, dan sistem jaringan sumber daya air Kabupaten. Untuk Pola ruang wilayah Kabupaten mencakup kawasan lindung dan kawasan budi daya termasuk kawasan andalan dengan sektor unggulan yang prospektif dikembangkan dapat dilihat . (*Lihat Peta 2.3 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Enrekang*. Selain rencana pengembangan struktur ruang dan pola ruang, RTRW kabupaten Enrekang ini juga menetapkan kriteria penetapan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis Kabupaten; arahan pemanfaatan ruang yang merupakan indikasi program utama jangka menengah lima tahun; serta arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas indikasi arahan, arahan insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi.

Adapun Strategi pengembangan kawasan perdesaan dan perkotaan terdiri atas :

- a. mengembangkan kawasan perdesaan dan perkotaan dengan mengacu pada karakteristik secara fisik-morfologi dan kegiatan ekonominya;
- b. mengembangkan kawasan sesuai dengan potensi wilayah yang dimiliki untuk perdesaan dengan berbasis pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan sedangkan untuk perkotaan diarahkan berdasarkan hirarki kota yakni pusat pelayanan, aksesibilitas, fasilitas dan pemusatan kegiatan ekonomi wilayah;
- c. mendorong kawasan perkotaan dan perdesaan serta pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam mendorong pengembangan wilayah sekitarnya;

Strategi untuk peningkatan akses pelayanan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah meliputi:

- a. meningkatkan interkoneksi dan akses pelayanan dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kawasan wilayah dengan wilayah sekitarnya;

- b. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang potensial dan belum terlayani oleh pusat pertumbuhan eksisting;
- c. membangun dan mengembangkan kawasan agropolitan sebagai andalan pengembangan kawasan perdesaan; serta
- d. membangun, mengembangkan dan mengintegrasikan jalur kawasan tujuan pariwisata dan daya tarik wisata secara optimal dan sinergi dengan perkembangan wilayah.

Strategi untuk peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur serta jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi dan sumber daya air meliputi:

- a. meningkatnya kualitas dan kapasitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat;
- b. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan yang masih terisolir;
- c. meningkatkan jaringan energi dengan lebih menumbuhkembangkan pemanfaatan sumber daya terbarukan yang ramah lingkungan dalam sistem kemandirian energi area mikro, dibanding pemanfaatan sumber daya yang tak terbarukan.

Pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Enrekang terdiri atas Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). PKL adalah Kawasan Perkotaan Enrekang. PKLp yaitu PKLp Cakke, PKLp Maiwa, PKLp Belajen dan PKLp Baraka. PPK terdiri atas ibukota kecamatan yang tidak termasuk PKL atau PKLp, yang terdiri atas:

- a. kawasan perkotaan Kabere di Kecamatan Cendana;
- b. kawasan perkotaan Baroko di Kecamatan Baroko;
- c. kawasan perkotaan Panatakan di Kecamatan Bungin;
- d. kawasan perkotaan Curio di Kecamatan Curio;
- e. kawasan perkotaan Malua di Kecamatan Malua;
- f. kawasan perkotaan Masalle di Kecamatan Masalle;
- g. kawasan perkotaan Pasui di Kecamatan Buntu Batu.

Sedangkan PPL, meliputi pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa, terdiri atas:

- a. Kalosi di Kecamatan Alla;
- b. Pana di Kecamatan Alla;
- c. Balla di Kecamatan Baraka;
- d. Saruran di Kecamatan Anggeraja;
- e. Banti di Kecamatan Baraka;
- f. Baba di Kecamatan Cendana;
- g. Buttu Batu di Kecamatan Enrekang;
- h. Kaluppang di Kecamatan Maiwa;
- i. Kotu di Kecamatan Anggeraja;
- j. Lura di Kecamatan Anggeraja;
- k. Cendana di Kecamatan Anggeraja;
- l. Sossok di Kecamatan Anggeraja;
- m. Singki di Kecamatan Anggeraja;
- n. Panyura di Kecamatan Buntu Batu;
- o. Lebani di Kecamatan Maiwa; dan
- p. Bulu di Kecamatan Bungin

RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN ENREKANG

Berdasarkan Permen PU Nomor 16 Tahun 2009, yang dimaksud Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya yang mempunyai nilai strategis kabupaten dan atau lintas kecamatan dan atau kota. Kebijakan pengembangan pola ruang ditujukan untuk mewujudkan pola penggunaan ruang yang seimbang antara daya lindung kawasan lindung dengan kapasitas produksi dan pemanfaatan kawasan budidaya secara asri dan lestari. Kawasan lindung yang baik yang bersifat: (i) preservasi berupa hutan lindung baik di daerah ketinggian pedalaman yang merupakan daerah hulu (upstream) Daerah Aliran Sungai (DAS), (ii) konservasi berupa taman margasatwa. Selain daripada itu, untuk kepentingan pelestarian warisan sejarah dan budaya dapat ditetapkan suatu kawasan konservasi seperti cagar budaya bangunan buatan manusia yang

ditetapkan sebagai benda purbakala. Dalam kawasan budi daya juga diusahakan sebisa mungkin menumbuhkembangkan dan melestarikan kawasan lindung setempat baik ruang darat, maupun udara untuk menjaga keasrian dan kelestarian ragam hayati, yang juga merupakan mata rantai sistem ekologi wilayah, seperti ruang terbuka hijau, baik berupa hutan kota, jalur hijau di sempadan sungai, sempadan danau, dan sempadan jalan. Dalam skala lingkungan mikro terutama di daerah perdesaan diarahkan tumbuh berkembangnya tatanan desa mandiri pangan dan energi yang didukung alam yang asri dan lestari. Pola pemanfaatan daerah perkotaan diarahkan juga dapat terwujud tatanan lingkungan yang swatata dalam memproduksi dan mengolah daya penentralisiran limbah (*Lihat Peta 2.3. Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Enrekang*)

Profil Sanitasi Saat ini

2.1.1. Air Limbah Domestik

Pelaksanaan pembangunan sanitasi dengan mengukur dan memperbaharui kondisi dasar sanitasi, memantau dampak, hasil dan keluaran dari kegiatan sektor sanitasi kabupaten dan memastikan bahwa tujuan dan sasaran sanitasi, rencana pengembangan dan target tertentu sanitasi kabupaten, serta kepatuhan pada standar pelayanan minimum yang ada sudah dilaksanakan secara efektif. Perkembangan pelaksanaan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen strategi sanitasi Kabupaten Enrekang tahun 2021 penanganan BABS memberikan dampak yang besar, berdasarkan hasil studi EHRA praktik BABS masih menunjukkan angka 24,53 % tahun 2021.

Profil Sanitasi merupakan gambaran lengkap dan menyeluruh baik teknis maupun nonteknis dan mencakup berbagai aspek tentang sanitasi di Kabupaten Enrekang baik yang bersumber dari data primer maupun data sekunder. Secara umum kondisi pengelolaan sanitasi Kabupaten Enrekang masih belum memadai. Secara umum sarana pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Enrekang masih memiliki permasalahan. (lihat tabel 2.2 Capaian Akses Air Limbah Domestik)

(1) Sistem dan Infrastruktur

Tabel 2.2 Capaian Akses Air Limbah Domestik

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
1	2	3	4
Wilayah Perkotaan			
1	Akses Aman	%	0
2	Akses Layak	%	2
A	Akses Layak Individual	%	0
B	Akses Layak Komunal	%	2,5
3	Akses Belum Layak	%	11
4	BABS ditempat tertutup	%	0,06
5	Persentase BABS di Tempat terbuka	%	10,6
Wilayah Perdesaan			
1	Akses Aman	%	5
2	Akses Layak	%	28
A	Akses Layak Individual	%	29,6
B	Akses Layak Komunal	%	0,97
C	Akses Layak Khusus Perdesaan	%	0,78
3	Akses Belum Layak	%	28,58
4	BABS ditempat tertutup	%	0,87
5	Persentase BABS di Tempat terbuka	%	21,4

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Tabel 2.3 Sub-Sistem Pengangkutan SPALD-Setempat

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
1	2	3	4
Pemerintah Daerah			
1	Jumlah Truk Tinja/Motor/Kedoteng	Unit	
2	Kondisi	Rusak/Beroperasional	
3	Kapasitas Tangki truk Tinja/Motor/kedoteng	M3	
4	Volumen lumour tinja yang dibuang ke IPLT	M3/hari	
5	Jumlah Truk Tinja/Motor/Kedoteng yang membuang lumour tinja ke IPLT	Truk/Hari	
6	Rata-rata RT terlayani Pengurusan Lumour Tinja	RT/Hari	
Swasta			
1	Jumlah Truk Tinja/Motor/Kedoteng	Unit	
2	Kondisi	Rusak/Beroperasional	
3	Kapasitas Tangki truk Tinja/Motor/kedoteng	M3	
4	Volumen lumour tinja yang dibuang ke IPLT	M3/hari	
5	Jumlah Truk Tinja/Motor/Kedoteng yang membuang lumour tinja ke IPLT	Truk/Hari	
6	Rata-rata RT terlayani Pengurusan Lumour Tinja	RT/Hari	

Sumber : POkja PKP

Foto Sarana Pengolahan IPAL

Peta Cakupan Layanan IPAL

Tabel. 2. 4 Sub Sistem Layanan dan Pengolahan SPALD Terpusat

No	Nama IPALD	Kelurahan/desa yang masuk dalam Cakupan Pelayanan	Kapasitas Desain (SR)	Kapasitas Terpakai (SR)	Kondisi Bangunan	Tahun Dibangun/ Rehabilitasi	Lembaga Pengelola/ Penanggung Jawab	Serah Terima Asset	Pemeriksaan Effluen Semesteran (Dilakukan =1; Tidak Dilakukan=2)
1	SPALD - Terpusat Enrekang	Juppandang, Kec. Enrekang	50	50	Bangunan Baik	0	BLUD	Sudah	2

Peta 2.4
Cakupan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik

Sumber ; Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Enrekang

Walaupun IPAL sudah ada terbangun namun belum sepenuhnya termanfaatkan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara jaringan Sambungan Rumah yang menuju ke IPAL yang ter bangun di depan kantor Kecamatan Enrekang. Selain itu tidak adanya dinas atau lembaga yang bertugas memelihara IPAL tersebut akibat kurangnya biaya pemeliharaan permasalahan lainnya adalah ketidaktahuan masyarakat kapan perlu dilakuan penyedotan lumpur tinja ditambah dengan tingkat layanan dan pemeliharaan jamban juga rendah, ini terbukti dari banyaknya sarana MCK baik pribadi maupun MCK umum yang dibangun oleh pemerintah hanya menjadi monumen yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Tabel 2.5 Hasil Analisis Gap Pencapaian Akses Air Limbah berdasarkan target RPJMN 2020-2024

No	Komponen	Target RPJMN 2020-2024 (%)	Target - 2024 (%)		Target Jangka Pendek	Capaian (%) Tahun: 2022	GAP (%) Terhadap Target 2024	GAP (%) Terhadap Target Jangka Pendek
			Provinsi Sulawesi Selatan	Kabupaten ENREKANG	Kabupaten ENREKANG			
1	Akses Aman	15%	8,0%	15,0%	12,0%	4,7%	10,3%	7,3%
2	Akses Layak	90%	95,0%	85,0%	52,0%	166,5%	-81,5%	-114,5%
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	0%*	0%**	40,0%	20,0%	158,6%	-118,6%	-138,6%
	Akses Layak Bersama	0%*	0%**	15,0%	10,0%	2,6%	12,4%	7,4%
	Akses Layak Khusus Perdesaan (Leher Angsa - Cubluk)	0%*	0%**	15,0%	10,0%	0,6%	14,4%	9,4%
3	Belum Layak BABS	0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,6%	-0,6%	-0,6%
4	Tertutup BABS di							
5	Tempat Terbuka	0%	0,0%	0,0%	0,0%	9%	-9,0%	-9,0%

Infrastruktur pengelolaan air limbah domestik (tangki septik individual, MCK Komunal, IPAL Domestik, IPLT,dll) yang ada di Kabupaten Enrekang, kondisi saat ini pengelolaan air limbah terlihat dari rantai layanan. (Gambar 2.2. Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Air Limbah Domestik

Rantai Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik

Persentase penduduk yang air limbah ditampung ke SPALD terpusat sebesar 4%, Persentase air limbah diolah di IPAL Terpusat skala kota/kawasan tertentu (kebocoran=0) sebesar 4 %, Persentase penduduk yang lumpur tinjanya ditampung ke Tangki Septik Layak sebesar 38 %, Persentase penduduk memiliki akses belum layak sebesar 1%, Persentase penduduk memiliki akses cubluk perdesaan sebesar 1 %, Persentase penduduk yang tangki septiknya pernah disedot dan di angkut sebesar 1 %, Persentase debit lumpur tinja diangkut dan diolah di IPLT sebesar 1 %, persentase BABS (ditempat terbuka) sebesar 1,46%.

(2) Kelembagaan dan Kebijakan/Peraturan

a. Kelembagaan Pemerintah Daerah

Pengelolaan air limbah domestik menjadi tupoksi lintas OPD yang mana secara teknis menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Pengelolaan air limbah domestik juga berkaitan erat dengan tupoksi OPD Dinas Lingkungan Hidup, dan Bappelitbangda Kab. Enrekang terutama dalam hal perumusan kebijakan, pengawasan maupun pembinaan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup serta Bappelitbangda lebih memainkan peran sebagai regulator. Upaya-upaya preventif dan promotif menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dari rangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik sehingga peran dari Dinas Kesehatan juga sangat penting.

Daftar (pemetaan) Dinas dan Badan

Perangkat Daerah	Urusan Air Limbah Domestik
Dinas PU TR	Pengelolaan air limbah domestik
Dinas Lingkungan Hidup	Upaya Preventif dan Promotif
Dinas Kesehatan	Upaya Preventif dan Promotif
Bappelitbangda	Regulasi

b. Peran Serta Swasta dan Masyarakat

Ditingkat masyarakat dan swasta belum ada upaya yang terfokus terhadap sistem pengelolaan air limbah domestik yang memenuhi standar pelayanan penyehatan lingkungan. Dengan kedudukan kelembagaan yang masih lemah baik ditingkat masyarakat, swasta dan pemerintah maka upaya pencapaian target pengelolaan air limbah belum ada langkah-langkah yang nyata.

Sistem pengelolaan limbah domestik terpusat ditingkat masyarakat sangat ditentukan kemampuan ekonomi masing-masing Rumah Tangga. Pada wilayah perkotaan umumnya rumah batu, sedangkan di wilayah perkotaan umumnya rumah permanen. Jenis bangunan rumah sangat menentukan jenis fasilitas pengelolaan limbah domestik masing-masing dari pipa pembuangan langsung ke tanah, bahkan ada juga yang tidak memakai pipa pembuangan, sedangkan rumah batu permanen umumnya dari pipa pembuangan ke saluran drainase.

Pengelolaan limbah domestik ***Black Water***, pada umumnya rumah tangga baik dipedesaan maupun diperkotaan telah memiliki jamban keluarga dan pada beberapa desa memiliki MCK/jamban komunal. Tetapi masih banyak jamban keluarga yang belum memiliki septic tank yang memenuhi standar teknis, bahkan ada beberapa jamban keluarga yang tidak memiliki septic tank, dari Kloset langsung ke sungai.

2.3.2 Pengelolaan Persampahan

Kondisi pengelolaan persampahan yang ada di Kabupaten Enrekang saat ini dapat dilihat dari segi kualitas maupun kuantitas infrastruktur serta dari segi aspek non infrastruktur. Dari segi kualitas maupun kuantitas infrastruktur masih belum memadai apabila dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Enrekang yang cukup besar. Hal tersebut disebabkan karena kondisi geografis Kabupaten Enrekang yang bergunung sehingga sangat sulit untuk mengelola persampahan di seluruh wilayah kabupaten.

(1) Sistem dan Infrastruktur

Kriteria dan dasar pelayanan persampahan berdasarkan yang menjadi target Pembangunan Nasional adalah 70% sampah domestik dan 100% sampah non domestik harus mendapatkan penanganan melalui sistem pelayanan umum. Pemerintah Kabupaten Enrekang masih belum mampu melayani persampahan secara menyeluruh, baik untuk daerah perkotaan apalagi perdesaan yang jauh dari Ibukota kabupaten. Konsentrasi untuk pendistribusian sampah dari TPS ke TPA baru berkisar di kota Enrekang Kec. Enrekang, Kota Cakke Kec. Anggeraja dan Kota Sudu dan Kalosi Kec. Alla, Kota Baraka Kecamatan Baraka, Kota Maroangin Kecamatan Maiwa dan Kota Kabere Kecamatan.

Berdasarkan hasil kajian EHRA, maka pengelolaan sampah ditingkat rumah tangga masih menunjukkan perilaku yang tidak baik, 13,5 % responden menyatakan membuang sampah ke sungai/kali/saluran, hal ini menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Perilaku yang lain yang justru paling tinggi yaitu membakar sampah di tempat sebesar 44,8 %. Perilaku membuang ke lahan kosong/kebun/dibiarkan membusuk 30 % dan dibuang kelobang tapi tidak ditutup sebesar 1,3 %.

Sementara perilaku yang baik seperti dibuang kedalam lobang dan kemudian ditutup dengan tanah hanya sebesar 7 % responden yang melakukannya, kegiatan pengumpulan ke TPS hanya 6,6 %, maka dapat dibayangkan seberapa besar pengaruhnya terhadap kualitas udara setiap saat dihirup. Namun berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup, cakupan pelayanan persampahan 77,95 % di kota dan 5,36 % di Desa (*Lihat Tabel 2.6 Capaian Akses Layanan Sampah Perkotaan, Gambar 2.2 Sistem Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Enrekang*).

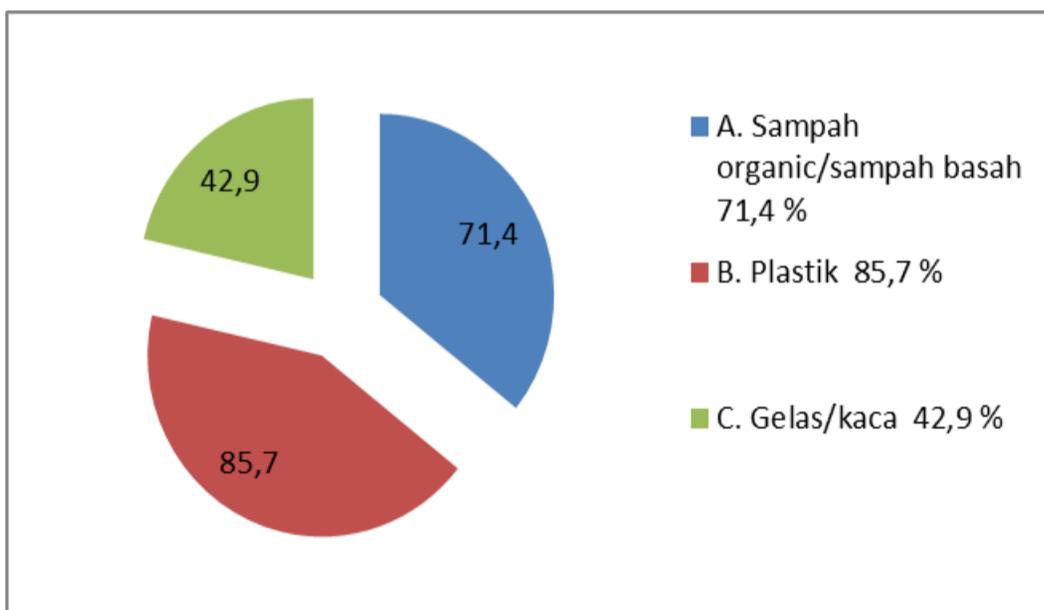
Tabel 2. 6
Capaian Akses Layanan Sampah Perkotaan

No.	Sistem	Cakupan layanan eksisting (%)
Wilayah Perkotaan		
1	Pengurangan Sampah	5,6%
2	Penanganan Sampah	0,0%
3	Sampah Tidak Terkelola	94,4%
Total		100,0%

Sumber : Kantor Lingk. Hidup Kab.Enrekang

Tabel 2.7 Timbulan Sampah

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Timbulan sampah rumah tangga	ton/hari	694.486
	Perkotaan	ton/hari	155.881
	Perdesaan	ton/hari	538.605
	Data Komposisi sampah (apabila ada)	% oragnik	71,4
		% anorganik	64,3



Tabel 2.8 Sub Sistem Pengumpulan

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jumlah Infrastruktur pengumpulan		
	Gerobak	unit	13
	Gerobak Motor	unit	12
	Pick Up	unit	1
	Becak	unit	0
2	Kapasitas angkut total		
	Gerobak	m3	19
	Gerobak Motor	m3	18
	Pick Up	m3	0
	Becak	m3	0
3	Ritase	Rit/hari	1

Gerobak Motor Roda Tiga



Pick up



Tabel 2.9 Sub Sistem

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jumlah TPS		
	Transfer depo	unit	1
	TPS	unit	1
	Kontainer	unit	1
	Tong Sampah Pejalan Kaki	unit	1
2	Kapasitas TPS		
	Transfer depo	m3	1
	TPS	m3	1
	Kontainer	m3	1
	Tong Sampah Pejalan Kaki	m3	1
3	Jumlah Alat Angkut		
	Compactor Truk	unit	0
	Armroll truck	unit	3
	Dump truk	unit	10
	Pick Up	unit	1
4	Kapasitas Alat Angkut		
	Compactor Truk	m3	0
	Armroll truck	m3	4
	Dump truk	m3	40
	Pick Up	m3	1
5	RitasI Pengangkutan	rit/hari	1

Sarana Pengumpulan yang dimiliki



Tabel 2.10 Sub Sistem Pengolahan

No	Jenis Pengolahan	Lokasi (Nama Desa dan Titik Koordinat)	Persentase Luas instalasi terhadap luas lahan total (%)	Wilayah Cakupan Layanan	Kodisi Pengelolaan (Beroperasi/Tidak)	Tahun Pembangunan	Tahun Optimalisasi (jika ada)	Kegiatan Pengolahan (Pengomposan/ dll)	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah yang Terolah menjadi Bahan Baku/Kompos (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA (Ton/Hari)	Pengelola (KSM/ Dinas/ UPTD)	Status Aset
1	TPST	Kelurahan Bangkala ; (-3,745272 , 119,86935)	0	0	Tidak beroperasi	2018	0	Pengolahan menjadi sumber energi	0	0	0	Seksi	Belum Diproses
2	TPST	Desa Patondon Salu; (-3,779572 , 119,918611)	0	0	Beroperasi	2019	0	Pengolahan menjadi sumber energi	700	0,1	0	Seksi	Belum Diproses
3	TPST	Kelurahan Tomena ; (-3,412139 , 119,86167)	0	0	Tidak beroperasi	2019	0	Pengolahan menjadi sumber energi	0	0	0	Seksi	Belum Diproses
4	TPST	Kelurahan Lewaja; (-3,565 , 119,7899)	0	0	Beroperasi	2014	0	0	700	0	0	Seksi	0
5	TPST	Desa Ongko Maiwa	0	0	Beroperasi		0	Pengolahan menjadi sumber energi	1000	0	0	Seksi	Belum Diproses

Tabel 2.11 Sub Sistem Pemrosesan Akhir

No	Deskripsi	Satuan	TPA	TPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Nama dan Lokasi TPA	0	TPA Ma'tang, Desa Batu Mila Kec Maiwa	Desa Batu Mila Kecamatan Maiwa
	Wilayah Pelayanan	0	Kecamatan Maiwa	Kecamatan ...
2	Tahun pembangunan	0	2004	0
	Tahun Optimalisasi	0	0	0
	Usia Pakai TPA (tahun)	0	18	0
3	Status aset (pilih salah satu)	0		
		Serah Terima Aset atau Pembelian sendiri		
		Serah Terima Operasional		
		Belum serah terima		
4	Luas lahan efektif tersedia	Ha	5,7	0
5	Luas lahan efektif terpakai	Ha	5	0
6	Sistem TPA yang digunakan	Pilih	Controlled Landfill	Open Dumping
7	Kondisi TPA	Pilih	Beroperasi	Tidak beroperasi
8	Alat berat: bulldozer, excavator, backhoe	Unit	Bulldozer: 1 Excavator : 1	Bulldozer: 1

9	Ketersediaan jembatan timbang	Unit	1	0
10	Kondisi jalan akses masuk	Aspal/beton atau perkerasan atau tanah	Aspal	Aspal
11	Jumlah sampah yang ditimbun di TPA	Ton/hari	0,5	0
12	Jumlah sampah yang dikelola di TPA (direcovery / dikumpulkan oleh Pemulung, pengomposan, lainnya: ...)	Ton/hari	0,02	0
13	Recovery gas metan (ada/tidak ada, jika ada sebutkan jumlahnya)	Gg/hari	0	0
14	Listrik	Gwh/hari	53000	0
15	Pemeriksaan Effluent Lindi (Dilakukan/Tidak) jika dilakukan lampirkan hasilnya secara rutin (3-6 bulan sekali)	0	Dilakukan	Dilakukan
16	Jarak terdekat dengan area permukiman	Km	1	0

Pemrosesan AKhir



TPA Ma'tang



Tabel . 2. 12 Pengurangan Sampah

No	Jenis Infrastruktur	Lokasi (Nama Desa dan Titik Koordinat)	Kodisi Pengelolaan (Beroperasi/ Tidak)	Tahun Pembangunan	Tahun Optimalisasi (jika dilakukan)	Kegiatan Pengurangan (Pengomposan/ daur ulang)	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah yang Terolah menjadi Bahan Baku/Kompos (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA (Ton/Hari)	Pengelola (KSM/ Dinas/ UPTD)	Status Aset
	(TPS3R/ Bank Sampah/Sektor Informal/Pelapak yang bekerjasama dengan Pemda)										
1	TPS 3R	Kelurahan Bangkala ; (-3,745272 , 119,86935)	Tidak beroperasi	2018	0	Daur Ulang & Pengomposan	0	0	0,1	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
2	TPS 3R	Desa Patondon Salu; (-3,779572 , 119,918611)	Beroperasi	2019	0	Daur Ulang	0,70	0	0	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
3	TPS 3R	Kelurahan Tomena ; (-3,412139 , 119,86167)	Tidak beroperasi	2019	0	Daur Ulang	0	0,04	0	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
4	TPS 3R	Kelurahan Lewaja; (-3,565 , 119,7899)	Beroperasi	2014	0	Daur Ulang	0,75	0	0	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
5	TPS 3R	Desa Ongko Maiwa	Beroperasi			Daur Ulang	10	0	0	Klp Swadaya Masyarakat	
6	Bank Sampah	Bank Sampah Pusat Enrekang (-	Beroperasi	2018	0	Daur Ulang	40	0	0,01	Seksi	Belum Diproses

		3,575325 , 119,774659)									
7	Bank Sampah	Bank Sampah Induk Kukku; (-3,564722 , 119,789688)	Tidak beroperasi	2017	0	Daur Ulang	0	0	0,005	Seksi	Belum Diproses
8	Bank Sampah	Bank Sampah Unit Hotel Bisma	Beroperasi			Daur Ulang	0,50	0	0	Seksi	
9	Bank Sampah	Bank SMPN 1 Enrekang; (-3,566185 , 119,776327)	Tidak beroperasi	2017	0	Daur Ulang	0	0	0	UPTD	Belum Diproses
10	Bank Sampah	Bank Sampah Rutan; (-3,584354 , 119,773344)	Tidak beroperasi	2020	0	Daur Ulang	0	0	0	Seksi	Belum Diproses
11	Bank Sampah	Bank Sampah Maccirina; (-3,563263 , 119,771588)	Tidak beroperasi	2017	0	Daur Ulang	0	0	0	Seksi	Belum Diproses
12	Bank Sampah	Bank Sampah Sejahtera; (-3,565460 , 119,775966)	Beroperasi	2017	0	Daur Ulang	0,11	0	0	Seksi	Belum Diproses
13	Bank Sampah	Bank Sampah Desa Tapong; (-3,654315 , 119,880815)	Tidak beroperasi	2019	0	Daur Ulang	0	0	0	BumDes	Belum Diproses
14		Bank Sampah Al Mubarak; (-3,560305 , 119,787138)	Beroperasi	2019	0	Daur Ulang	0,05	0	0	Pengelola kawasan	Belum Diproses
15	Bank Sampah	Bank Sampah	Tidak	2019	0	Daur Ulang	0	0	0	BumDes	Belum

		Desa Karrang; (-3,685355 , 119,787744)	beroperasi								Diproses
16	Bank Sampah	Bank Sampah KRM; (-3,706517 , 119,797588)	Tidak beroperasi	2020	0	Daur Ulang	0	0	0	UPTD	Belum Diproses
17	Bank Sampah	Bank Sampah Desa Batu Mila; (-3,721701 , 119,827340)	Tidak beroperasi	2020	0	Daur Ulang	0	6,5	0	BumDes	Belum Diproses
18	Bank Sampah	Bank Sampah TPA Matang; (-3,702361 , 119,782461)	Beroperasi	2016	0	Daur Ulang	0,5	12	0	UPTD	Belum Diproses

Tabel 2.13 Analisis Gap Pencapaian AKses Sampah Perkotaan berdasarkan target RPJMN 2020 – 2024

No	Komponen	Target RPJMN 2020-2024	Target - 2024 (%)		Target Jangka Pendek	Capaian (%) Tahun:2022	GAP (%) Terhadap Target 2024	GAP (%) Terhadap Target Jangka Pendek
			Provinsi Sulawesi Selatan	Kabupaten ENREKANG	Kabupaten ENREKANG			
1	Penanganan Sampah Perkotaan	80%	83,0%	80,0%	70,0%	0,0%	80,0%	70,0%
2	Pengurangan Sampah Perkotaan	20%	17,0%	20,0%	30,0%	5,6%	14,4%	24,4%

Timbulan sampah di Kabupaten Enrekang berasal dari buangan kegiatan produksi dan konsumsi manusia baik dalam bentuk padat kering, dan basah yang berasal dari permukiman, perkantoran, sarana pendidikan, sarana kesehatan, pasar, pertokoan dan sapuan jalan.

Timbulan sampah dari tahun ke tahun meningkat, hal ini tentunya dipengaruhi oleh penambahan jumlah penduduk dari tahun ke tahun yang relevan dengan peningkatan ekonomi penduduk. Pengangkutan sampah saat ini melayani 14 Kelurahan dari 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Enrekang, Kecamatan Cendana, Kecamatan Maiwa, Kecamatan Anggeraja, Kecamatan Alla dan Kecamatan Baraka, namun tidak semua kelurahan/Desa yang ada di kecamatan terlayani ini diakibatkan oleh kurangnya armada sampah dan kurangnya tenaga kerja lapangan, sementara ini hanya melayani wilayah perkotaan, sebagian Kelurahan dan Kecamatan yang mudah di jangkau oleh armada sampah.

Di bawah ini kita bisa melihat Rantai Layanan Sanitasi :



Figure 1

Jumlah Residu TPS 3R yang masuk dan diproses di TPA adalah 1,54% dengan total timbulan sampah perkotaan sebesar 155.881 ton/tahun atau 100%, Jumlah Sampah tereduksi di TPS 3R sebesar 2.400 ton/tahun atau 1,54%, Jumlah sampah tereduksi di Bank sampah sebesar 5.150 ton/tahun atau 3,30%, Jumlah residu TPS 3R yang masuk dan diproses di TPA sebesar 2.400 ton/tahun atau 1,54%, JUmlah Residu TPST yang masuk dan diproses di TPA sebesar 2.400 ton/tahun atau 1,54%, Jumlah sampah yang diproses di TPA dari Pengangkutan Langsung (Rumah-TPA) dan Pengumpulan tidak langsung sebesar 338.219,70 ton/tahun atau 216,97 %, Jumlah total sampah di proses di TPA sebesar 343.019,70 ton/tahun atau 220,05 %, dan jumlah total sampah tidak terkelola (termasuk sampah yang tidak terangkut/terkumpul di tingkat rumah tangga) minus 194.688,70 ton/tahun atau minus 124,90 %. Sistem pengelolaan persampahan di Kabupaten Enrekang meliputi : Pewadahan, Pengumpulan Sementara, Pemindahan dan Pengangkutan Akhir.

(2) Kelembagaan dan Kebijakan/Peraturan

Berdasarkan orientasi kerja dan kesepadanan tupoksi OPD maka pengelolaan sub sektor persampahan secara operasional berkaitan langsung dengan Dinas Lingkungan Hidup. Sedangkan, Bappelitbangda lebih berperan dalam perumusan kebijakan serta perencanaan secara makro.

Dinas Lingkungan Hidup yang memiliki mandat tupoksi langsung untuk pengelolaan persampahan. Tupoksi yang dimaksud antara lain merencanakan langkah-langkah teknik, menyusun konsep yang sifatnya teknis, melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi secara teknis kegiatan pengelolaan persampahan. Hal tersebut tergambar dari tupoksi yang diemban antara lain merumuskan kebijakan operasional, melaksanakan pembinaan, evaluasi implementasi program pencegahan dan pengendalian serta pemulihan kualitas lingkungan. Tupoksi tersebut kemudian menempatkan Dinas Lingkungan Hidup pada posisi regulator dan operator dalam pengelolaan persampahan.

Merumuskan kebijaksanaan, program dan kegiatan pembangunan daerah bidang Perencanaan Wilayah meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, perumahan dan pemukiman, merupakan tupoksi Bappelitbangda sehingga juga memiliki keterkaitan erat dengan pengelolaan persampahan. Bidang Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan adalah bidang berkaitan erat dengan pengelolaan persampahan.

3) Peran Serta Swasta dan Masyarakat

Disisi lain, pihak swasta maupun lembaga non pemerintah sampai saat ini belum memperlihatkan partisipasi, inisiatif dan kontribusi nyata terhadap pengelolaan persampahan. Pengelolaan persampahan tidak cukup hanya berorientasi pada upaya-upaya penyediaan sarana dan prasarana serta penyelamatan lingkungan tetapi juga sangat diintervensi oleh aspek penyehatan lingkungan dan perilaku hidup masyarakat.

2.3.3. Drainase Lingkungan

(1) Lokasi Genangan dan Perkiraan Luas Genangan

Kondisi jaringan drainase lingkungan khususnya di Ibukota Kabupaten secara kuantitas sudah cukup tersedia baik pada ruas jalan utama maupun di unit lingkungan permukiman. Namun secara kualitas pada kenyatannya masih terdapat saluran drainase yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya yang disebabkan oleh adanya ketidakpedulian masyarakat perkotaan akan fungsi drainase diperparah lagi karena belum adanya master plan drainase yang bisa mengontrol perencanaan drainase yang di kota Enrekang pada khususnya dan seluruh kecamatan pada umumnya. Lihat Tabel 2. 14 Lokasi Genangan.

Tabel. 2.14 Lokasi Genangan

No	Lokasi Genangan	Wilayah Genangan					Infrastruktur	
		Luas	Ketinggian	Lama	Frekuensi	Penyebab	Jenis	Ket.
		(Ha)	(m)	(jam/hari)	(kali/tahun)			
1	Kel. Bangkala, Desa Patondon Salu, Desa Bontongan	3,07	0,1-0,3	2-4	2 kali	Sistem Jaringan dan Daya Tampung Drainase	Saluran Pasangan Batu	-
2	Kel. Juppandang, Kel. Galonta, Kel. Leoran, Kel. Pusserren, Desa Ranga, Desa Karueng	18,7	0,1-0,3	2-4	2 kali	Sistem Jaringan dan Daya Tampung Drainase	Saluran Pasangan Batu	-
3	Kel. Baraka, Kel. Tomenawa, Kel. Balla, Desa Banti, Tirowali	13,8	0,1-0,3	1-2	2 kali	Sistem Jaringan dan Daya Tampung Drainase	Saluran Pasangan Batu	-
4	Kel. Lakawan, Kel. Tanete, Desa Bamba Puang, Desa Maendatte, Desa Mampu	16,5	0,1-0,3	1-3	2 kali	Sistem Jaringan dan Daya Tampung Drainase	Saluran Pasangan Batu	-
5	Kel. Kambiolangi, Kel. Buntu Sugi, Kel. Kalosi, Desa Pana	10,8	0,1-0,3	1-2	2 Kali	Sistem Jaringan dan Daya Tampung Drainase	Saluran Pasangan Batu	-
6	Kel. Malua Desa Bonto Desa Tallung Tondok Desa Kolai	9,9	0,1-0,3	1-2	2 kali	Sistem Jaringan dan Daya Tampung Drainase	Saluran Pasangan Batu	
7	Desa Cendana Desa Taulan Desa Pinang	6,2	0,1-0,3	1-2	2 kali	Sistem Jaringan dan Daya Tampung Drainase	Saluran Pasangan Batu	
8	Desa Masalle Desa Rampunan Desa Buntu Sarong	5,9	0,1-0,3	1-2	2 kali	Sistem Jaringan dan Daya Tampung Drainase	Saluran Pasangan Batu	
9	Desa Baroko Desa BT. Alla Desa Tongko	5,2	0,1-0,3	1-2	2 kali	Sistem Jaringan dan Daya Tampung Drainase	Saluran Pasangan Batu	

(2) Peta Lokasi Genangan

Peta. 2.7 Peta Lokasi Genangan



(3) Sistem dan Infrastruktur

Tabel 2. 15 Kondisi Sarana dan Prasarana Drainase Lingkungan

No	Jenis Prasarana/ Sarana	Satuan	Bentuk Penampang saluran	Dimensi		Kondisi		Frekuensi Pemeliharaan (kali/tahun)
				B (m)	H (m)	Berfungsi	Tidak Berfungsi	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)
1	Saluran Primer Kawasan Juppandang	M	Trapesium	2,2	3,1	610	0	1 / 3 Tahun
	- Saluran Sekunder Juppandang	M	Trapesium	1,5	1,6	2.700	0	1 / 3 Tahun

	Bangunan Pelengkap							
	- Rumah Pompa	Unit	-	0	0	0	0	-
	- Pintu Air	Unit	-	0	0	0	0	-
	- Kolam Retensi	Unit	-	0	0	0	0	-
	- Trash Rack/ Saringan Sampah	Unit	-	0	0	0	0	-
2	Saluran Primer Kawasan Galonta	M	Trapesium	2,2	3,1	730	0	1 / 3 Tahun
	- Saluran Sekunder Galonta	M	Trapesium	1,5	1,6	3.100	0	1 / 3 Tahun
	Bangunan Pelengkap							
	- Rumah Pompa	Unit	-	0	0	0	0	-
	- Pintu Air	Unit	-	0	0	0	0	-
	- Kolam Retensi	Unit	-	0	0	0	0	-
	- Trash Rack/ Saringan Sampah	Unit	-	0	0	0	0	-

Terkait dengan risiko kesehatan lingkungan, telah diketahui luas bahwa mereka yang tinggal di perumahan padat, misalnya di gang-gang sempit, akan memiliki resiko kesehatan lingkungan yang lebih besar ketimbang mereka yang tinggal di lingkungan yang kurang padat. Penyakit-penyakit seperti TBC, diare dan influenza adalah contoh penyakit-penyakit yang mudah menyebar di antara warga yang tinggal di rumah-rumah padat dan berdempetan. Enumerator EHRA mengamati keberadaan saluran air di sekitar rumah terpilih. Saluran yang dimaksud adalah saluran yang digunakan untuk

membuang air bekas penggunaan rumah tangga (*grey water*), seperti air dapur (bekas cuci piring/ bahan makanan), air cuci pakaian maupun air bekas mandi. Seperti kebanyakan terjadi di kota-kota di Indonesia, saluran *grey water* dapat pula berfungsi menjadi saluran bagi pengaliran air hujan (*drainage*). Bila suatu rumah didapati memiliki saluran, enumerator akan mengamati lebih dekat apakah air di saluran itu mengalir, dan melihat apakah terdapat tumpukan sampah di dalam saluran air itu. Saluran yang memadai ditandai dengan aliran airnya yang lancar atau tidak ada air warna airnya yang cenderung bening atau bersih, dan tidak adanya tumpukan sampah di dalamnya

Berdasarkan hasil study EHRA, bahwa system Drainase yang ada di Kabupaten Enrekang selain Drainase yang permanen juga masih ada yang berbentuk galian tanah. Sementara ditinjau dari segi layanan drainase secara keseluruhan, maka rumah tangga yang mempunyai system pembuangan air limbah non tinja dalam hal ini drainase lingkungan/selokan, 80 % sudah mempunyai, 19,1 % yang belum mempunyai SPAL. Kondisi topografi yang dominan dataran tinggi di Kabupaten Enrekang secara langsung meminimalkan ancaman banjir. Kajian study EHRA menunjukkan bahwa 93,9 % rumah tangga untuk klaster desa I di Kabupaten Enrekang tidak pernah mengalami banjir rutin.

Masterplan perencanaan drainase lingkungan di Kabupaten Enrekang di kota Enrekang selaku induk perencanaan pembangunan drainase sudah ada sejak tahun 2004, akan tetapi sudah tidak layak digunakan karena perkembangan pembangunan yang semakin cepat sehingga perlu untuk dilakukan revisi Masterplan.

Dalam rangka penanganan drainase lingkungan saat ini belum terdapat kerjasama yang cukup optimal antara Pemerintah Kabupaten, swasta dan masyarakat. Hal ini terlihat dari beberapa praktik yang ada saat ini seperti pengelolaan drainase lingkungan yang sebenarnya merupakan tanggung jawab masyarakat namun ternyata masih sedikit dijalankan oleh masyarakat, selebihnya

dikelola oleh Pemerintah Kabupaten selain itu drainase lingkungan juga masih difungsikan sebagai saluran pembuangan air limbah domestik ataupun limbah ternak di beberapa wilayah oleh masyarakat sehingga terjadi beberapa potensi wilayah genangan.

Secara struktur drainase di Kabupaten Enrekang pada umumnya adalah pasangan batu, namun pemeliharaan yang kurang baik sehingga pendangkalan terjadi dan ditambah banyaknya sampah yang menumpuk di selokan mengakibatkan kurang lancarnya sistim pengaliran di dalam saluran tersebut.

2.3 Area beresiko dan permasalahan sanitasi

Risiko sanitasi dapat diartikan terjadinya penurunan kualitas hidup, kesehatan, bangunan dan atau lingkungan akibat rendahnya akses terhadap layanan sektor sanitasi dan perilaku hidup bersih dan sehat. Dalam penentuan area berisiko sanitasi ditetapkan berdasarkan:

1. Data Sekunder

Penentuan area berisiko sanitasi berdasarkan data sekunder adalah kegiatan menilai dan memetakan tingkat risiko sebuah area administrasi kelurahan berdasarkan data yang telah tersedia di SKPD dan tersedia di sumber data lainnya. Data sekunder yang dimaksud adalah data-data mengenai ketersediaan prasarana dan sarana air limbah, persampahan, dan drainase serta data umum wilayah yang meliputi populasi, luas wilayah, kepadatan penduduk, dan angka kemiskinan.

2. Penilaian SKPD

Penentuan area berisiko berdasarkan penilaian SKPD diberikan berdasarkan pengamatan, pengetahuan praktis dan keahlian profesi yang dimiliki individu anggota pokja sanitasi Kabupaten Enrekang yang mewakili SKPD terkait sanitasi dari Bappelitbangda, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Kesehatan, Kantor Lingkungan Hidup, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat & Desa.

3. Studi EHRA

Penentuan area berisiko berdasarkan hasil studi EHRA adalah kegiatan penilaian dan pemetaan tingkat risiko berdasarkan kondisi sumber air, pencemaran karena air limbah domestik, pengelolaan persampahan di tingkat rumah tangga, kondisi drainase, perilaku cuci tangan pakai sabun, higiene jamban, penanganan air minum, dan buang air besar sembarangan.

Hal yang diteliti dalam EHRA terdiri dari 2 (dua) hal utama, yakni 1) Sumber Air dan 2) Pengolahan, penyimpanan dan penanganan air yang baik dan aman. Kedua aspek ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan tingkat risiko kesehatan bagi anggota di suatu rumah tangga. Dari sisi jenis sumber diketahui bahwa sumber-sumber air memiliki tingkat keamanannya tersendiri, Ada jenis-jenis sumber air minum yang secara global dinilai sebagai sumber yang relatif aman, seperti air botol kemasan, air ledeng/PDAM, sumur bor, sumur gali terlindungi, mata air terlindungi dan air hujan (yang ditangkap, dialirkan dan disimpan secara bersih dan terlindungi). Di lain pihak, terdapat sumber-sumber yang memiliki risiko yang lebih tinggi sebagai media transmisi patogen ke dalam tubuh manusia, di antaranya adalah, sumur atau mata air yang tidak terlindungi dan air permukaan, seperti air kolam, sungai, waduk ataupun danau.

Tabel 2.16 Area Berisiko Sumber Air Berdasarkan Hasil Study EHRA

VARIABEL	KATEGORI	Strata Desa/Kelurahan						Total	
		1		2		3		7	8
		n	%	n	%	n	%	N	%
1.1 Sumber air terlindungi	Tidak, sumber air berisiko tercemar	252	48,5	230	28,8	47	23,5	529	34,8
	Ya, sumber air terlindungi	268	51,5	570	71,3	153	76,5	991	65,2
1.2 Penggunaan sumber air tidak terlindungi.	Tidak Aman	106	20,4	134	16,8	60	30,0	300	19,7
	Ya, Aman	414	79,6	666	83,3	140	70,0	1220	80,3
1.3 Kelangkaan air	Mengalami kelangkaan air	241	46,3	292	36,5	79	39,5	612	40,3
	Tidak pernah mengalami	279	53,7	508	63,5	121	60,5	908	59,7

Sumber. Hasil Study EHRA

Waktu-waktu cuci tangan pakai sabun yang perlu dilakukan seorang ibu/pengasuh untuk mengurangi risiko balita terkena penyakit-penyakit yang berhubungan dengan diare mencakup 5 (lima) waktu penting yakni, 1) sesudah buang air besar (BAB), 2) sesudah menceboki pantat anak, 3) sebelum menyantap makanan, 4) sebelum menyuapi anak, dan terakhir adalah 5) sebelum menyiapkan makanan bagi keluarga.

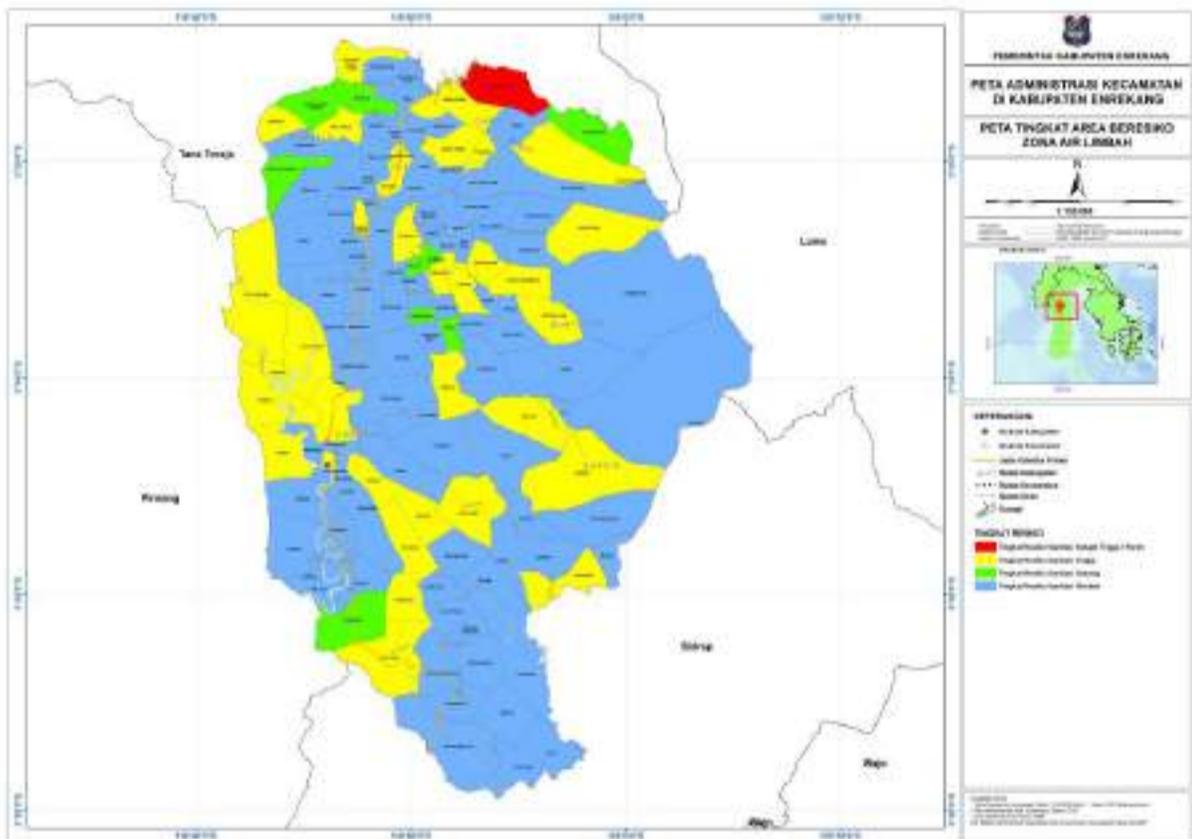
Untuk menelusuri perilaku-perilaku cuci tangan yang dilakukan ibu sehari-harinya, EHRA terlebih dahulu memastikan penggunaan sabun di rumah tangga dengan pertanyaan apakah si Ibu menggunakan sabun hari ini atau kemarin. Jawabannya menentukan kelanjutan pertanyaan berikutnya dalam wawancara. Mereka yang perilakunya dialami oleh EHRA terbatas pada mereka yang menggunakan sabun hari ini atau kemarin.

Tabel 2.17 Area Beresiko Perilaku Higiene dan Sanitasi Berdasarkan Hasil Studi EHRA

VARIABEL	KAEGORI	Strata Desa/Kelurahan						Total	
		1		2		3		7	8
		N	%	N	%	n	%	n	%
5.1 CTPS di lima waktu penting	Tidak	470	90,4	696	87,0	159	79,5	1325	87,2
	Ya	50	9,6	104	13,0	41	20,5	195	12,8
5.2.a. Apakah lantai dan dinding jamban bebas dari tinja?	Tidak	120	23,1	215	26,9	43	21,5	378	24,9
	Ya	400	76,9	585	73,1	157	78,5	1142	75,1
5.2.b. Apakah jamban bebas dari kecoa dan lalat?	Tidak	138	26,5	202	25,3	45	22,5	385	25,3
	Ya	382	73,5	598	74,8	155	77,5	1135	74,7
5.2.c. Keberfungsian penggelontor.	Tidak	73	14,0	183	22,9	13	6,5	269	17,7
	Ya, berfungsi	447	86,0	617	77,1	187	93,5	1251	82,3
5.2.d. Apakah terlihat ada sabun di dalam atau di dekat jamban?	Tidak	125	24,0	259	32,4	15	7,5	399	26,3
	Ya	395	76,0	541	67,6	185	92,5	1121	73,8
5.3 Pencemaran pada wadah penyimpanan dan penanganan air	Ya, tercemar	146	28,1	289	36,1	51	25,5	486	32,0
	Tidak tercemar	374	71,9	511	63,9	149	74,5	1034	68,0
5.4 Perilaku BABS	Ya, BABS	115	22,1	259	32,4	38	19,0	412	27,1
	Tidak	405	77,9	541	67,6	162	81,0	1108	72,9

Sumber. Hasil Study EHRA

Berdasarkan data Sekunder, Penilaian SKPD dan data studi EHRA, diperoleh gambaran area berisiko sanitasi Kabupaten Enrekang untuk pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan persampahan dan drainase perkotaan. (Lihat Peta 2.10. Peta Area Berisiko Sanitasi Air Limbah Domestik, Peta 2.11. Peta Area Berisiko Sanitasi Persampahan, dan Peta 2.12. Peta Area Berisiko Sanitasi Drainase Perkotaan)



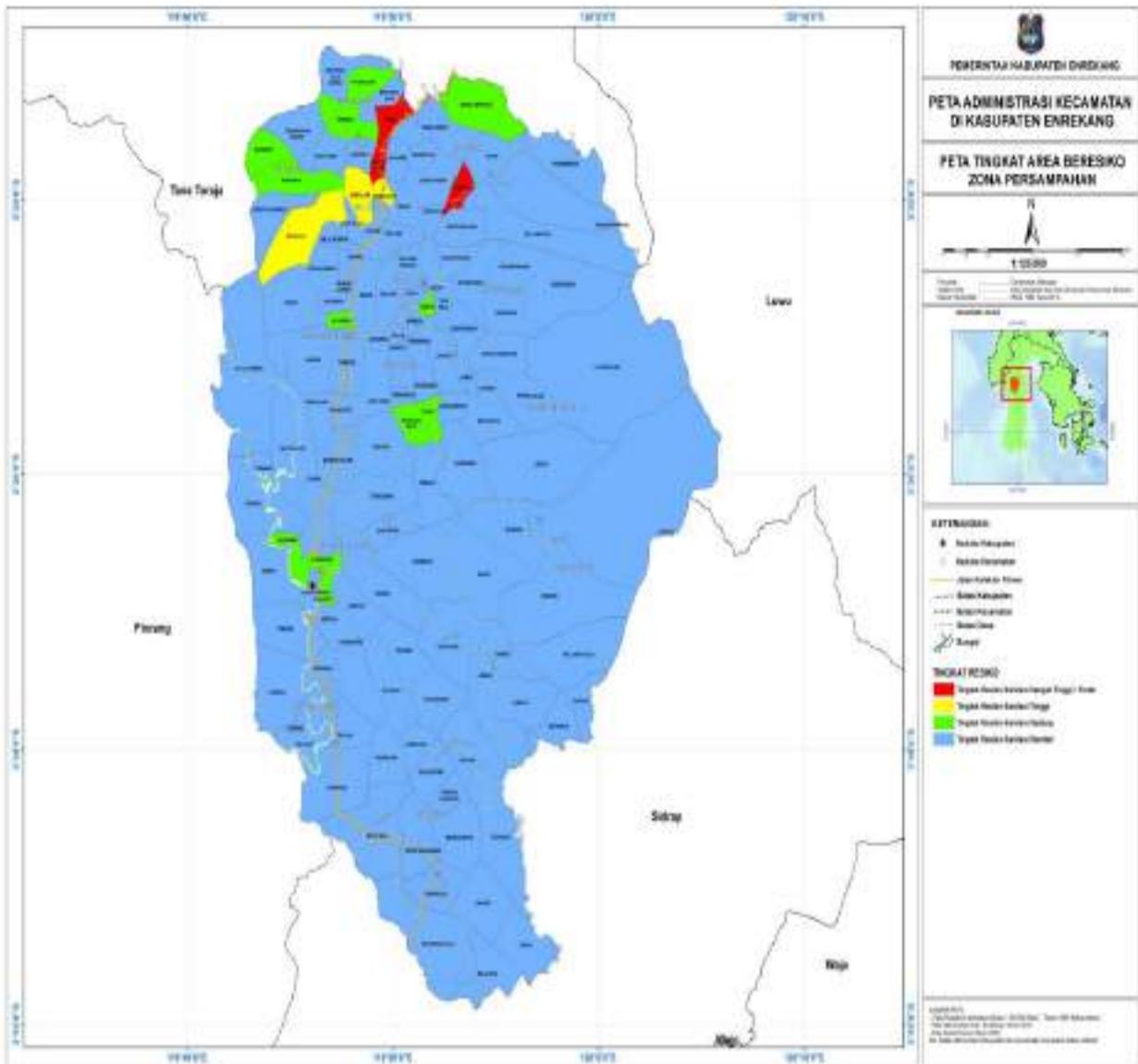
Peta 2.10 Peta Area Berisiko Sanitasi Air Limbah Domestik

Area Berisiko	Jml	Wilayah Prioritas Air Limbah
Resiko 4	1 Desa	Desa Buntu Barana
Resiko 3	28 Desa dan 6 Kelurahan	Desa : Batu Mila, Palakka, Pasang, Baringin, Matajang, Pariwang, Baruka, Bungin, Tobalu, Cemba, Tungka, Temban, Buttu Batu, Tallu Bamba, Bontongan, Bonebone, Pottokullin, Buntu Mondong, Bubun Lamba, Dulang, Buntu Pema, Sanglempongan, Pebaloran, Sumbang, Mundan, Batu Kede, dan Benteng Alla Utara.

		<p>Kelurahan :</p> <p>Kelurahan Juppandang, Kelurahan Lewaja, Kelurahan Tuara, Kelurahan Tomenawa, Kelurahan Kalosi, Kelurahan Kambiolangi,</p>
--	--	---

Tabel2.18 Permasalahan mendesak Air Limbah domestic san Issue Strategis

No	Permasalahan Mendesak	Issue Strategis
1	Tatanan pola hidup bersih dan sehat belum berkembang secara merata pada hampir semua lini kehidupan bermasyarakat.	1. Peningkatan pelayanan kualitas system air limbah dan pemicuan PHBS
2	Belum Adanya system pengelolaan air limbah domestik yang memenuhi syarat, sehingga air limbah domestik masih berpotensi mencemari air tanah dan air permukaan	2. Sistem pengelolaan air limbah masih menggunakan system on-site sehingga pencemaran air sungai oleh limbah domestik, sehingga tidak layak dijadikan sebagai sumber air baku untuk air minum
3	Sarana dan Prasarana limbah domestik (IPAL) sudah tidak layak dan belum ada IPLT sehingga potensi pencemaran cukup tinggi.	3. Sistem kelembagaan sanitasi masih lemah, kondisi ini menuntut adanya peningkatan kapasitas layanan pengelolaan air limbah
4	Tidak adanya keterlibatan pihak swasta dalam mendukung peningkatan kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam layanan pengelolaan limbah	4. Meningkatkan pembiayaan melalui kemitraan pemerintah dan swasta
5	Tingkat kepemilikan jamban masih relatif rendah.	5. Fasilitasi peningkatan pengelolaan air limbah melalui pelatihan SDM
6	Sistem Kelembagaan yang masih lemah, kepedulian masyarakat, dunia usaha dan pemerintah yang berinflikasi terhadap pendanaan yang jauh dari yang diharapkan	

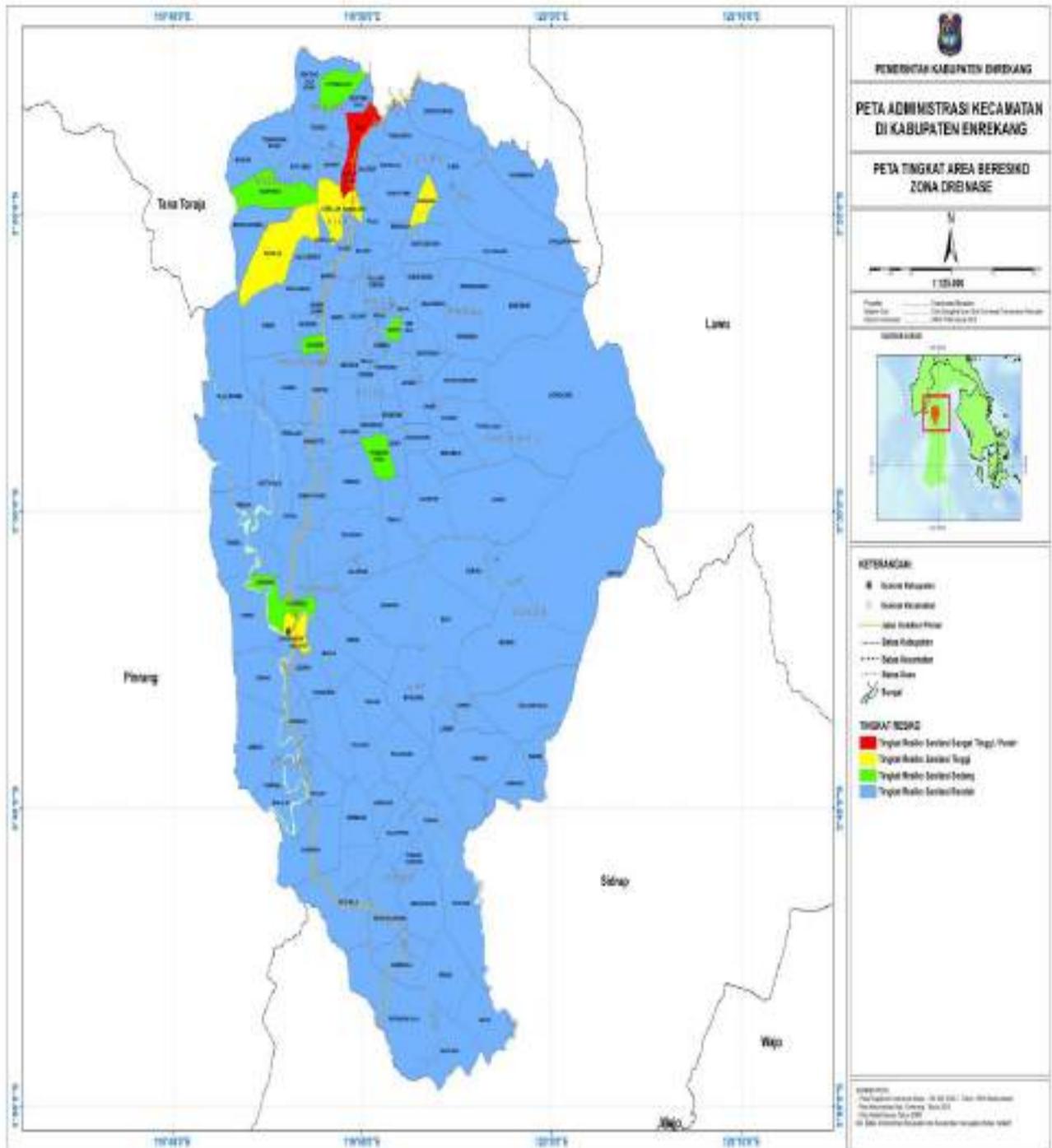


Peta 2.11 Peta Area Beresiko Sanitasi Persampahan

Area Beresiko	Jml	Wilayah Prioritas Persampahan
Resiko 4	3 Desa dan 1 Kelurahan	Desa : Desa Pana, Desa Sumbang, Desa Masalle. Kelurahan : Kelurahan Buntu Sugi
Resiko 3	2 Desa dan 1 Kelurahan	Desa : Desa Sumillan, Desa Masalle, Kelurahan Kambiolang

Tabel 2.19 Permasalahan mendesak Persampahan issue Strategis

Permasalahan Mendesak	Issue Strategis
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan dan pembuangan sampah perkotaan masih dianggap sebagai tanggung jawab pemerintah daerah. 2. Secara kelembagaan pengelolaan persampahan di Kabupaten Enrekang belum sebanding antara struktur kelembagaan yang diberi tanggung jawab yakni kepala seksi (Eselon IV), dengan cakupan wilayah pelayanan yang lebih besar. 3. Peran dan partisipasi masyarakat pemilahan sampah masih sangat kurang baik ditingkat Rumah Tangga maupun tempat-tempat fasilitas umum. 4. Produksi sampah semakin meningkat setiap tahun akibat pertambahan penduduk dan peningkatan aktivitas sosial ekonomi masyarakat, sedangkan kemampuan pemerintah dalam pelayanan sampah masih belum cukup memadai. 5. Ketersediaan saran dan prasarana pemilahan, pewadahan dan pengangkutan sampah masih belum cukup memadai melayani seluruh kota di Kabupaten Enrekang, sehingga memicu perilaku masyarakat membuang sampah di pinggir jalan, semak/lahan kosong, dan bahkan ke sungai. 6. Jarak tempuh terjauh dari tempat pelayanan sampah di kota Sudu ke TPA sekitar 65 Km, dari kota Enrekang ke TPA sekitar 25 Km, sehingga banyak volume sampah yang tidak terangkut serta biaya operasional pengangkutan dan pemeliharaan cukup tinggi. 7. Infrastruktur dan sarana penunjang di TPA Matang belum cukup memadai untuk pengembangan pengelolaan sampah sesuai criteria teknis yang dipersyaratkan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelembagaan SKPD pemerintah daerah belum cukup memadai dalam pengelolaan persampahan daerah. 2. Partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah masih rendah. 3. Kecenderungan terjadi deviasi antara volume timbulan sampah yang lebih tinggi dengan volume sampah yang terangkut setiap hari. 4. Fungsi TPA Matang belum maksimal untuk pengelolaan persampahan dan lokasinya TPA cukup jauh dari wilayah perkotaan Duri Kompleks sekitar 62 Km 5. Timbulan sampah sangat tinggi pada lokasi pasar khususnya pada hari-hari pasar yang umumnya sampah organik. 6. Standar operasional dan prosedur pelayanan / pengelolaan persampahan belum berlangsung efektif karena regulasi daerah yang ada hanya mengatur pelaksanaan kebersihan dalam Kota Enrekang (Perda No. 6 Tahun 2004). 7. Alokasi anggaran yang bersumber dari APBD II terhadap kegiatan pengelolaan persampahan yang belum memadai, maka sangat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pelayanan



Peta 2.12 Peta Area Beresiko Sanitasi Drainase Perkotaan

Area Beresiko	Jml	Wilayah Prioritas Drainase
Resiko 4	1 Desa dan 1 Kelurahan	Desa Pana dan Kelurahan Buntu Sugi
Resiko 3	3 Desa dan 3 kelurahan	Desa : Sumillan, Sumbang, Masalle Kelurahan : Galonta, Juppandang, Kambiolangi

Tabel. 2.20 Permasalahan Mendesak Drainase dan Issue Startegis

Permasalahan Mendesak	Issue Strategis
<p>1. Beberapa Ruas jalan lingkungan permukiman belum memiliki Drainase</p> <p>2. Sebagian besar drainase khususnya dalam kota Enrekang tidak berfungsi (tersumbat dan tergenang)</p> <p>3. Kondisi topografi wilayah yang umumnya pegunungan, menyulitkan pembangunan drainase yang memadai di lingkungan permukiman yang juga pada kontur berbukit.</p>	<p>1. Sistem pengelolaan drainase perkotaan/ permukiman belum sepenuhnya memenuhi standar teknis yang baik.</p> <p>2. Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan drainase masih sangat rendah</p> <p>3. Kondisi alam kabupaten Enrekang pada banyak titik merupakan daerah rawan longsor, atau tekstur tanah yang labil, sehingga sering mengakibatkan kerusakan bangunan drainase yang telah ada</p> <p>4. Drainase masih berfungsi sebagai pembuangan air limbah</p>

BAB 3

KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI

3.1. Visi dan Misi Sanitasi

Visi dan misi sanitasi telah dirumuskan untuk memberi arahan bagi pengembangan sanitasi Kabupaten Enrekang dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Enrekang. Keterkaitan antara visi dan misi Kabupaten Enrekang dengan visi dan misi sanitasi sangat mendukung pencapaian misi Kabupaten terutama misi yang pertama dan kedua. (Lihat Tabel 3.1. Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten Enrekang)

Tabel 3.1.
Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten Enrekang

VISI KABUPATEN	MISI KABUPATEN	VISI SANITASI KABUPATEN	MISI SANITASI KABUPATEN
Terwujudnya Enrekang Maju, Aman, Sejahtera (EMAS), menuju Daerah Agropolitan Berwawasan Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Publik. 2. Meningkatkan Kualitas SDM yang berdaya saing dan Aplikasi Teknologi. 3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan disertai dengan jaminan rasa aman dalam berbagai aktivitas kehidupan masyarakat tanpa Diskriminasi Laki-Laki Perempuan. 4. Meningkatkan 	Terwujudnya Sanitasi yang Layak, Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan di Kabupaten Enrekang	Misi Air Limbah Domestik <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan cakupan layanan pengelolaan air limbah dengan sistem setempat (On-Site) dan terpusat (Off-Site). - Mencegah dan menanggulangi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh air limbah permukiman. - Meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah yang ramah lingkungan. - Mendorong dunia usaha

	<p>Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat berbasis Agribisnis dan Agroindustri.</p> <p>5. Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam secara Optimal yang Berwawasan Lingkungan</p>		<p>agar lebih aktif dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan lembaga pengelolaan air limbah yang mandiri dan berkelanjutan. - Meningkatkan dan mengembangkan alternatif sumber pendanaan dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah permukiman. <p>Misi Persampahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengurangi timbulan sampah dalam rangka meningkatkan cakupan layanan pengelolaan persampahan yang berkelanjutan. - Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan sistem pengelolaan persampahan. - Meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam pengelolaan persampahan yang ramah lingkungan. - Mendorong dunia usaha agar lebih aktif dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan persampahan. - Mengembangkan lembaga pengelolaan persampahan yang mandiri dan berkelanjutan. - Peningkatan prioritas dan alokasi pendanaan bagi penyelenggaraan pelayanan persampahan. <p>Misi Drainase</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kuantitas
--	---	--	---

			<p>dan kualitas saluran drainase.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam pengelolaan drainase secara mandiri. - Mendorong peningkatan peran dunia usaha melalui penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan prasarana dan sarana penyehatan lingkungan - Membina pelaksanaan pembangunan dan mengembangkan prasarana dan sarana penyehatan lingkungan permukiman mendukung pencegahan pencemaran lingkungan. - Mendorong peningkatan kemampuan pembiayaan menuju ke arah kemandirian.
--	--	--	--

Sumber : Hasil Kajian Pokja Sanitasi Kabupaten Enrekang Tahun 2016

3.2. Pentahapan Pengembangan Sanitasi

Pencapaian pembangunan sektor sanitasi disusun dengan melakukan analisis terhadap kondisi wilayah saat ini serta arah pengembangan secara menyeluruh berdasarkan dokumen dokumen perencanaan yang telah ada.

Perkembangan pembangunan yang cukup pesat memerlukan antisipasi pengelolaan agar tidak mencemari dan menurunkan kualitas lingkungan, terutama air tanah dan air permukaan. Untuk itu perlu disusun pentahapan pembangunan mulai dari jangka pendek, jangka menengah hingga pembangunan jangka panjang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi pada masing-masing kawasan.

3.2.1. Tahapan Pengembangan Sanitasi

3.2.1.1. Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik

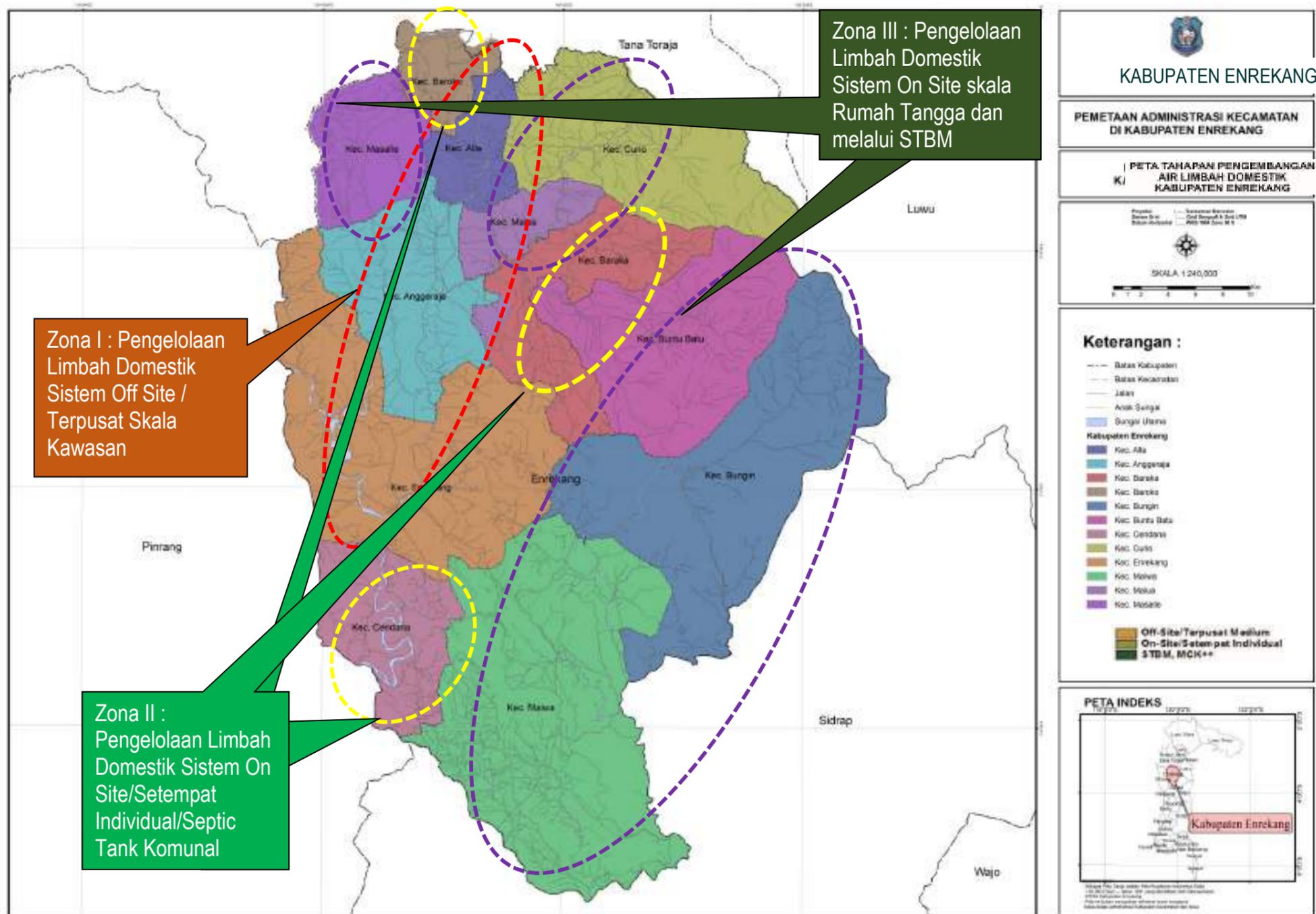
Beberapa kriteria yang menjadi pertimbangan dalam memecahkan permasalahan pengelolaan air limbah domestik adalah kepadatan penduduk, klasifikasi wilayah, karakteristik tata guna lahan, serta risiko kesehatan lingkungan. Analisis yang dilakukan menghasilkan suatu peta yang menggambarkan zona dan sistem pengelolaan air limbah yang akan menjadi bahan untuk tahapan pengembangan air limbah domestik.

Berdasarkan kondisi tersebut serta memperhatikan faktor-faktor lain seperti rencana tata guna lahan dan kondisi tanah, maka sistem pengelolaan air limbah di Kabupaten Enrekang dibagi ke dalam 3 zonasi sistem. (*Lihat Peta 3.1. Peta Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik*)

Berdasarkan Pemetaan tersebut dihasilkan suatu peta yang menggambarkan kebutuhan sistem pengelolaan air limbah untuk perencanaan pengembangan sistem. Peta tersebut terbagi dalam beberapa zonasi, dimana zona tersebut sekaligus merupakan dasar bagi Kabupaten dalam merencanakan pengembangan sanitasi. Rencana pengembangan tersebut diilustrasikan sebagai berikut:

- Zona I, merupakan kawasan permukiman padat dan kawasan perdagangan yang harus diatasi dengan pilihan sistem terpusat (*off-site*) skala kawasan dalam Jangka Panjang. Zona ini mencakup Kecamatan Enrekang, Kecamatan Alla, Kecamatan Anggeraja, Kecamatan Baroko dan Masalle.

- Zona II, merupakan wilayah kepadatan penduduk kategori sedang dan tingkat risiko sanitasi yang dapat diatasi dalam jangka menengah dengan perubahan perilaku, dan pemilihan sistemnya On Site Individual dengan pendekatan Septic Tank Komunal. Kecamatan yang masuk dalam zona ini adalah Kecamatan Baraka, Malua, Curio dan Buntu Batu.
- Zona III, merupakan area rural (kepadatan rendah) yang dapat diatasi dalam Jangka Pendek dengan pemilihan sistem setempat (On Site) skala Rumah Tangga wilayah kepadatan penduduk kategori sedang dengan tingkat kepadatan rendah yang dapat diatasi dalam jangka pendek melalui pilihan sistem setempat (*on-site*) individual dengan tangki septik individual/komunal. Penanganannya dengan kegiatan perubahan perilaku dan pemicuan serta pemberian stimulan pembangunan jamban keluarga. Zona ini mencakup kecamatan Maiwa, Buntu Batu, Curio, Masalle, Malua dan Bungin.



Peta 3.1. Peta Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik)

Dengan ilustrasi dan deskripsi seperti digambarkan diatas maka tahapan pengembangan air limbah domestik dibagi dalam 3 tahapan, yaitu:

1. Tahapan Jangka Pendek

Dalam 2 tahun (sampai tahun 2018), diharapkan akses sanitasi air limbah domestik yang layak dan berwawasan lingkungan pada wilayah perdesaan mencapai 82,65% dari 78,13% tahun 2015, dan wilayah perkotaan mencapai 96% dari 90,06% tahun 2015.

2. Tahapan Jangka Menengah

Untuk Jangka menengah diharapkan cakupan layanan air limbah dapat ditingkatkan menjadi 88% di perdesaan dan 96% di perkotaan . Diharapkan pula pada tahun 2020 sebanyak 75% dari 129 Desa/Kelurahan di Kabupaten Enrekang telah ODF 100%. Hal ini dapat di capai melalui program-program pemicuan dan kampanye kesehatan di tingkat desa/kelurahan.

3. Tahapan Jangka Panjang

Untuk Jangka Panjang diharapkan akses air limbah yang layak dapat ditingkatkan menjadi 100%. Untuk MCK++ tidak lagi dikembangkan mengingat kecenderungan masyarakat lebih memilih menggunakan jamban pribadi. *(lihat Tabel 3.2. Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Kabupaten Enrekang)*

Tabel 3.2.
Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Kabupaten Enrekang

No	Sistem	Cakupan layanan eksisting (%)	Target cakupan layanan (%)		
			Jangka pendek (s/d 2018)	Jangka menengah (s/d 2020)	Jangka panjang (s/d 2025)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
Wilayah Perdesaan					
A	Buang Air Besar Sembarangan (BABs)	21,5	7	0	0
B	Sistem Pengolahan Air Limbah Setempat (On-Site)	76	80	85	90
1	Cubluk dan sejenisnya	2	1	0	0
2	Tangki Septik	74	80	88	90
C	Sistem Komunal	2,5	5	8	9
1	MCK/MCK++	1,5	2	3	2
2	IPAL Komunal	1	3	5	7
3	Tangki Septik Komunal	0	0	0	0
D	Sistem Pengolahan Air Limbah terpusat (Off-Site)	0	0	0	1
Sub Total		100	100	100	100
Wilayah Perkotaan					
A	Buang Air Besar Sembarangan (BABs)	10	0	0	0
B	Sistem Pengolahan Air Limbah Setempat (On-Site)	87	91	93	87
1	Cubluk dan sejenisnya	0,5	0	0	0
2	Tangki Septik	86,5	91	93	87
C	Sistem Komunal	3	4	5	9
1	MCK/MCK++	2,5	2	1	1
2	IPAL Komunal	0,5	2	4	8
3	Tangki Septik Komunal	0	0	0	0
D	Sistem Pengolahan Air Limbah terpusat (Off-Site)	0	1	2	4
Sub Total		100	100	100	100

Sumber : Hasil Kajian Pokja Sanitasi Kabupaten Enrekang Tahun 2016

3.2.1.2. Tahapan Pengembangan Persampahan

Berdasarkan kriteria yang ada dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM), wilayah pengembangan pelayanan persampahan dapat diidentifikasi. Ada dua kriteria utama dalam penetapan prioritas penanganan persampahan, yaitu tata guna lahan/klasifikasi wilayah dan kepadatan penduduk. Kedua kriteria tersebut sangat berhubungan dengan aktivitas penghuninya yang akan mempengaruhi perhitungan jenis dan volume timbulan sampah. Dari hasil analisis yang didasarkan pada kedua kriteria tersebut, rencana pengembangan persampahan diilustrasikan sebagai berikut:

- Zona 1, merupakan area penanganan jangka menengah ke panjang, umumnya berada di area-area dengan kepadatan penduduk lebih kecil 25 orang/ha dan bukan fungsi pelayanan jasa dan perdagangan dengan cakupan secukupnya. Pada zona ini, dikembangkan sistem penanganan sampah dengan cakupan pelayanan minimal 70% dengan metode tidak langsung (TPS-TPA). Pengolahan sampah yang berbasis rumah tangga yang ditunjang dengan program sosialisasi pengolahan sampah yang ramah lingkungan, dengan opsi teknologi penyediaan sarana pengumpulan dan pengolahan sampah sementara. Zona ini meliputi Desa Sawitto, Desa TallungUra, Desa Baruka, Desa Ongko, Desa Boiya, dan Desa Bungin.
- Zona 2, merupakan area urban dengan tingkat kepadatan lebih besar 100 orang/ha yang dapat diatasi dalam jangka pendek ke menengah dengan opsi pengembangan pelayanan persampahan hingga 100% dengan metode pengumpulan langsung (RT-TPS-TPA). Opsi teknologi penyediaan sarana pengumpulan dan pengolahan sampah sementara. Zona ini meliputi Kelurahan Tuara

- Zona 3, merupakan area pusat pelayanan dan kawasan permukiman padat dan kawasan perdagangan (CBD) yang harus ditangani secara jangka pendek dengan opsi pengembangan pelayanan persampahan hingga 100% dengan metode pengumpulan langsung (RT-TPS-TPA) serta pelayanan penyapuan jalan (street sweeper) dan pengolahan sampah 3R pada lokasi-lokasi publik seperti pasar, pusat pertokoan, dan terminal. *(Lihat Peta 3.2. Peta Tahapan Pengembangan Persampahan)*

Berdasarkan ilustrasi seperti yang tergambar pada peta tahapan pengembangan persampahan maka tahapan pengembangan dibagi dalam 3 tahapan, yaitu:

1. Tahapan Jangka Pendek

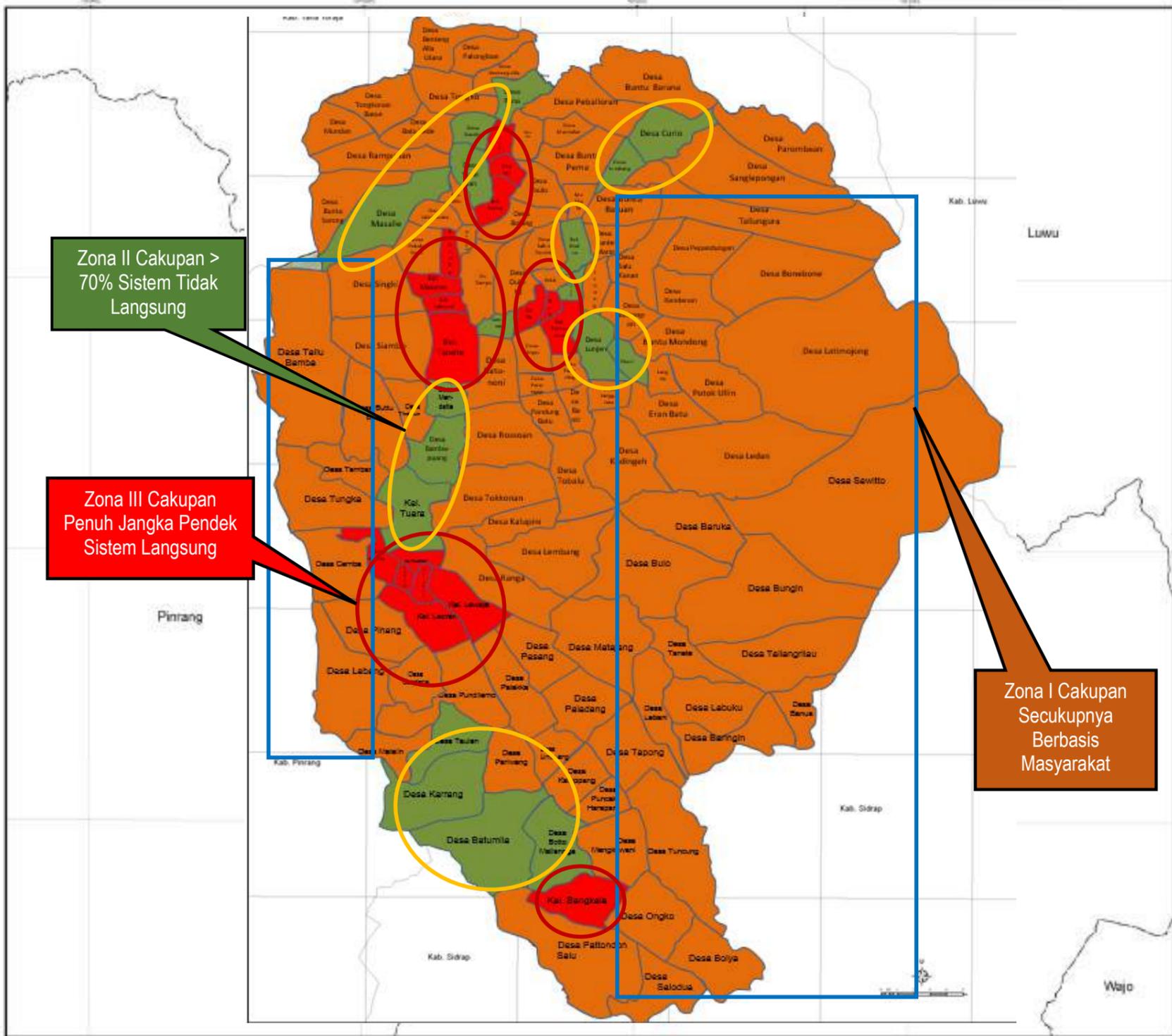
Untuk tahapan pengembangan persampahan jangka pendek, capaian yang diharapkan untuk sampah yang terangkut baik secara langsung maupun tidak langsung untuk wilayah perdesaan sebesar 93,00% dan wilayah perKabupatenan sebesar 91,00% dengan adanya bangunan 3R mengurangi timbulan sampah yang diangkut ke TPA.

2. Tahapan Jangka Menengah

Pada tahun 2020 cakupan layanan persampahan ditargetkan mencapai 100% untuk wilayah perKabupatenan. Dimana penanganan sampah 85% dan fasilitas reduksi sampah 15%.

3. Tahapan Jangka Panjang

Capaian jangka panjang selama 10 tahun ditargetkan cakupan layanan persampahan wilayah perKabupatenan mencapai 100% dengan penanganan sampah 80% dan fasilitas reduksi sampah 20%. *(Lihat Peta 3.2. Tahapan Pengembangan Persampahan Kabupaten Enrekang)*



KABUPATEN ENREKANG

PEMETAAN ADMINISTRASI KECAMATAN DI KABUPATEN ENREKANG

PETA TAHAPAN PENGEMBANGAN PERSAMPAHAN KABUPATEN ENREKANG

Proyeksi: UTM
Datum: WGS 84
Datum: Indonesia
Datum: 1963
SKALA: 1:240,000

Keterangan :

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Jalan
- Anak Sungai

- Cakupan Penuh+Penyusapan+Jangka Pendek (Sistem Langsung)
- Cakupan >70% (Sistem Tidak Langsung)
- Cakupan Secukupnya - Berbasis Masyarakat

PETA INDEKS

Tabel 3.3.
Tahapan Pengembangan Persampahan Kabupaten Enrekang

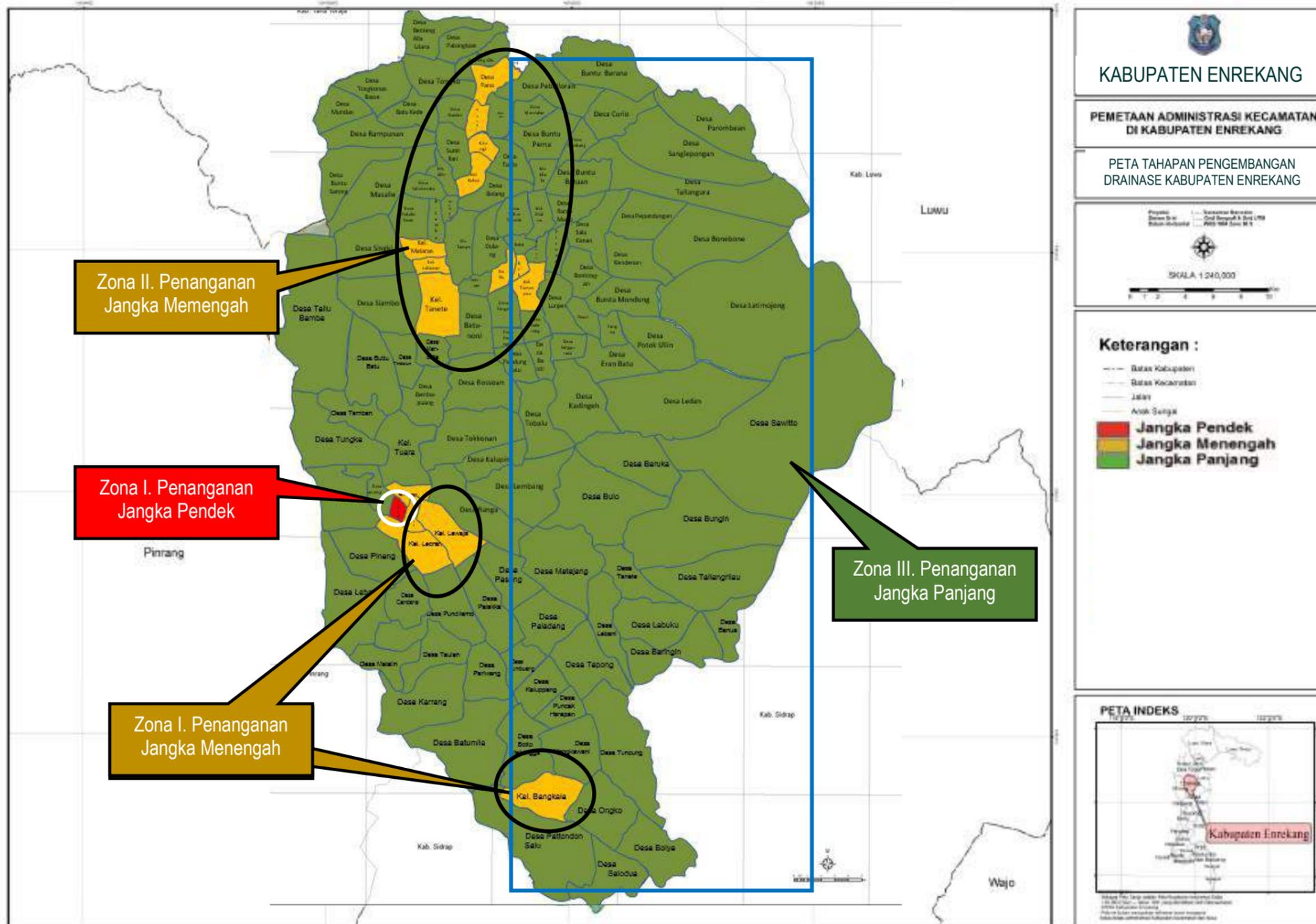
No	Sistem	Cakupan layanan eksisting (%)	Target cakupan layanan (%)		
			Jangka pendek (s/d 2018)	Jangka menengah (s/d 2020)	Jangka panjang (s/d 2025)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
Wilayah Perdesaan					
A	Persentase Sampah Yang Terangkut	3	5	10	15
1	Penanganan Langsung (direct)	0	0	0	0
2	Penanganan Tidak Langsung (indirect)	3	5	10	15
B	Dikelola mandiri oleh masyarakat atau belum terlayani	97	93	87	80
C	3R	0	2	3	5
Sub Total		100	100	100	100
Wilayah Perkotaan					
A	Persentase Sampah Yang Terangkut	75	85	85	85
1	Penanganan Langsung (direct)	65	75	80	85
2	Penanganan Tidak Langsung (indirect)	15	10	5	0
B	Dikelola mandiri oleh masyarakat atau belum terlayani	18	10	5	0
C	3R	2	5	10	15
Sub Total		100	100	100	100

Sumber : Hasil Kajian Pokja Sanitasi Kabupaten Enrekang Tahun 2016

3.2.1.3. Tahapan Pengembangan Drainase Perkotaan

Pengembangan sub sektor drainase memerlukan analisis yang tepat untuk menentukan pengembangan sistem yang sesuai agar pengembangan sistem drainase dapat berjalan dengan efektif dan berkesinambungan. Penentuan daerah prioritas ini disusun berdasarkan beberapa kriteria seleksi yaitu: kepadatan penduduk, klasifikasi wilayah, peruntukan wilayah serta risiko

kesehatan lingkungan. Sistem pengembangan drainase perKabupatenan dengan zona penanganan jangka panjang terhadap genangan. (*Lihat Peta 3.3. Peta Tahapan Pengembangan Drainase PerKabupatenan*)



Rencana pengembangan tersebut diilustrasikan sebagai berikut:

- Zona 1 merupakan area pusat pelayanan tingkat kabupaten dan kecamatan serta **Kawasan Permukiman padat & Perdagangan (CBD)** yang harus ditangani secara jangka pendek . Zona ini mencakup kawasan perkotaan Enrekang, utamanya di Kelurahan Juppandang dan Kelurahan Galonta. Sistem saluran drainase primer /makro dikembangkan melalui saluran pembuangan utama meliputi Sungai Mata Allo dan Sungai Saddang.
- Zona 2, merupakan area penanganan jangka menengah, pengembangan pelayanan tingkat kecamatan atau rencana pengembangan CBD, yakni pada kota-kota PKLp seperti Maroangin, Cakke, Sudu/Kalosi dan Baraka.
- Zona 3, merupakan area penanganan jangka panjang, umumnya berada di area-area rural/Ibukota Kecamatan (PPK) dan bukan fungsi pelayanan jasa serta intensitas genangan sangat rendah dan jarang terjadi.

Target layanan drainase sesuai kondisi genangan seluas 5,5 ha yaitu berkurangnya genangan 90% pada tahun 2020 dan tidak terjadinya genangan 2 kali dalam setahun. Pencapaian akan dilakukan secara bertahap dengan prioritas penanganan berdasarkan area berisiko sanitasi drainase perkotaan. (*Lihat Tabel 3.4. Tahapan Pengembangan Drainase PerKabupatenan Kabupaten Enrekang*)

Tabel 3.4.
Tahapan Pengembangan Drainase Perkotaan Enrekang

No	Titik Genangan di Area Permukiman	Luas Genangan Eksisting di Area Permukiman (ha)	Pengurangan Luas Genangan (ha)		
			Jangka pendek (s/d 2018)	Jangka menengah (s/d 2020)	Jangka panjang (s/d 2025)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1	Kel. Bangkala, Desa Patondon Salu	3,07	0	0	0
2	Kel. Juppandang, Kel. Galonta, Kel. Leoran, Kel. Pusserren, Desa Ranga, Desa Karueng	18,7	0	0	0
3	Kel. Baraka, Kel. Tomenawa, Kel. Balla, Desa Banti, Tirowali	13,8	0	0	0
4	Kel. Lakawan, Kel. Tanete, Desa Bamba Puang, Desa Maendatte, Desa Mampu	16,5	0	0	0
5	Kel. Kambiolangi, Kel. Buntu Sugi, Kel. Kalosi, Desa Pana	10,8	0	0	0
6	Kel. Malua Desa Bonto Desa Tallung Tondok Desa Kolai	9,9	0	0	0
7	Desa Cendana Desa Taulan Desa Pinang	6,2	0	0	0
8	Desa Masalle Desa Rampunan Desa Buntu Sarong	5,9	0	0	0
9	Desa Baroko Desa BT. Alla Desa Tongko	5,2	0	0	0
TOTAL		0,25	0,12	0,05	0

Sumber : Hasil Kajian Pokja Sanitasi Kabupaten Enrekang Tahun 2016

3.2.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi

Perumusan tujuan dan sasaran dalam pembangunan sanitasi dirumuskan berdasarkan visi sanitasi yang ingin dicapai dan melaksanakan misi sanitasi yang telah ditetapkan. Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dan mengatasi permasalahan mendesak yang dihadapi.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu yang dirumuskan untuk mencapai tujuan. Dalam perumusan sasaran digunakan kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Realistic, and Time Bound*).

Tujuan pembangunan sektor sanitasi Kabupaten Enrekang tahun 2016–2020 adalah untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten. Selanjutnya, tujuan pembangunan sanitasi memberi arahan serta koridor untuk penetapan sistem dan zona sanitasi termasuk tingkat layanan sanitasi.

3.2.2.1. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Air Limbah Domestik

Pencemaran tinja/kotoran manusia (*feces*) adalah sumber utama dari virus, bakteri, dan patogen lain penyebab diare. Derajat kesehatan dapat dilihat dari Umur Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita, Angka Kematian Ibu melahirkan, dan Angka Kesakitan/Kematian karena penyakit tertentu serta status Gizi Masyarakat.

Perumahan yang berada di atas dari sumber air bersih, dimana suplay air bersih tidak lancar dan sulit, akan mempengaruhi perilaku masyarakat untuk BABS dan penanganan sanitasi pun tidak maksimal atau berdampak terhadap sistem pengelolaan air limbah. Tujuan dan sasaran dirumuskan berdasarkan

kondisi terkini dan permasalahan yang ada. (Lihat Tabel 3.5. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Air Limbah Domestik)

Tabel 3.5.
Tujuan dan Sasaran Pengembangan Air Limbah Domestik

Tujuan	Sasaran	Data Dasar
Meningkatkan kualitas lingkungan dan derajat kesehatan masyarakat	Masyarakat Kabupaten Enrekang Stop BABS di tahun 2025	Masyarakat yang masih melakukan praktik BABS sebesar 31,5%
	100% penduduk memiliki jamban pribadi	Masyarakat yang memiliki jamban pribadi sebesar 78,7%
	Jamban pribadi memiliki tangki septik yang sesuai syarat kesehatan meningkat sebesar 20%	Tangki septik suspek aman sebesar 77,2%
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah	80% masyarakat yang lebih berperan aktif dalam pengelolaan air limbah	Masyarakat yang masih melakukan praktik BABS sebesar 31,5%
Mengembangkan alternatif sumber pendanaan dalam sistem pengelolaan air limbah	Pendanaan sanitasi dari APBD Kabupaten mencapai 5% pada tahun 2020	Proporsi anggaran Belanja Daerah disektor sanitasi sebesar 3%
	Pihak swasta dan lembaga donor berkontribusi dalam pengelolaan air limbah	Belum ada pihak swasta dan lembaga donor yang terlibat dalam pengelolaan air limbah
Meningkatkan kinerja kelembagaan dalam pengelolaan air limbah	SKPD terkait memiliki kemampuan yang baik dalam pengelolaan air limbah	SKPD yang menangani Dinas PU dan Kantor LH, Kebersihan dan Pertamanan

Sumber : Hasil Kajian Pokja Sanitasi Kabupaten Enrekang tahun 2016

3.2.2.2. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Persampahan

Prasarana dan sarana dasar persampahan yang ada di Kabupaten Enrekang belum sepenuhnya mampu melayani seluruh kota kecamatan. Pelayanan penuh/langsung masih fokus dalam kota Enrekang pada 5 Kelurahan, sedangkan pada kota kecamatan Alla, Anggeraja, Baraka, Maiwa dan Cendana masih memakai sistem tidak langsung atau pelayanan secara berkala. Prasarana dasar yang ada yaitu: TPA di Ma'tang desa Batu Mila, armada sampah berupa Arm Roll dan Dump Truck, TPS 3R di Kelurahan Lewaja serta TPS di tiap Lingkungan kelurahan. Dalam mengatasi permasalahan sub sektor persampahan membutuhkan strategi dan usaha-usaha yang lebih konkrit dalam menangani persampahan di Kabupaten Enrekang dan merumuskan tujuan yang dicapai dengan lebih tepat sasaran. *(Lihat Tabel 3.6. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Persampahan)*

Tabel 3.6.

Tujuan dan Sasaran Pengembangan Persampahan

Tujuan	Sasaran	Data Dasar
(1)	(2)	(3)
Mengurangi volume timbulan sampah ke TPA Ma'tang	Sampah yang terangkut ke TPA Ma'tang sebanyak 85% pada tahun 2020	Sampah yang terlayani dan diangkut mencapai 74% dengan armada Dump Truck tersedia 7 Unit dan 9 unit arm roll truck serta 9 unit motor roda 3
	Fasilitas reduksi sampah mencapai 15% pada tahun 2020	TPS 3R di Kelurahan Lewaja Kecamatan Enrekang

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga	Terbentuknya 5 kelompok masyarakat yang mengelola sampah secara terpadu	Kelompok pengelola sampah dengan konsep 3R berjumlah 1 kelompok
	Timbulan sampah dari sumbernya berkurang sampai 20% dengan penerapan konsep 3R	Pengolahan sampah setempat 11,30% dan pemilahan sampah skala rumah tangga 9,80%
Mengembangkan alternatif sumber pendanaan dalam sistem pengelolaan persampahan	Pendanaan sanitasi dari APBD Kabupaten mencapai 4 % pada tahun 2020	Proporsi anggaran APBD murni sanitasi terhadap belanja langsung sebesar 2,7%
	Pihak swasta dan lembaga donor berkontribusi dalam pengelolaan persampahan	Pihak swasta yang telah berpartisipasi yaitu perbankan di Kabupaten Enrekang
Meningkatkan kinerja kelembagaan dalam pengelolaan persampahan	SKPD terkait memiliki kemampuan yang baik dalam pengelolaan persampahan	SKPD yang menangani Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan

Sumber : Hasil Kajian Pokja Sanitasi Kabupaten Enrekang tahun 2016

3.2.2.3. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Drainase Perkotaan

Kondisi topografi Kabupaten Enrekang yang unik, yaitu bagian timur dan utara dan barat merupakan daerah pegunungan dengan ketinggian rata-rata 1.500 mdpl sedang pada bagian selatan lebih landai dan merupakan wilayah perbukitan sehingga sistem pembuangan air hujan terpusat mengarah kebagian selatan Kabupaten Enrekang. Dengan kondisi topografi tersebut, maka pada umumnya wilayah permukiman perkotaan jarang terjadi genangan, hanya pada beberapa titik dalam skala kecil terjadi di kota Enrekang. Dengan kondisi tersebut, Pokja Sanitasi Kabupaten Enrekang merumuskan tujuan dan sasaran

pengembangan drainase perkotaan Kabupaten Enrekang. (Lihat Tabel 3.7. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Drainase PerKabupatenan)

Tabel 3.7.
Tujuan dan Sasaran Pengembangan Drainase Perkotaan

Tujuan	Sasaran	Data Dasar
(1)	(2)	(3)
Meningkatkan fungsi drainase	Kota Enrekang bebas genangan pada akhir tahun 2020	Luas genangan sebesar 0,25 Ha. Dimana sebagian besar dipengaruhi oleh sistem drainase yang kurang baik
	Saluran 95% drainase primer, sekunder dan tersier berfungsi baik	Panjang drainase primer, sekunder dan tersier dalam lingkungan permukiman perkotaan sekitar 38.790 m
Meningkatkan kualitas lingkungan dengan pola pemberdayaan masyarakat	Mengembalikan fungsi drainase sebagai pembuangan limbah air hujan	Penyempitan penampang drainase yang disebabkan oleh sedimentasi maupun tumpukan sampah

Sumber: Hasil Kajian Pokja Sanitasi Kabupaten Enrekang tahun 2016

3.2.3. Skenario Pencapaian Sasaran

Skenario pencapaian sasaran dalam pengelolaan air limbah, sebagai salah satu rujukan adalah peraturan Menteri Pekerjaan Umum no. 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman dalam rangka kesesuaian percepatan pembangunan strategi sanitasi nasional. Di dalam pencapaian tersebut telah ditentukan wilayah prioritas pengembangan sistem pengelolaan air limbah secara umum dengan sistem *on-site* maupun sistem *off-site*. Kriteria yang dipergunakan antara lain

dalam penentuan prioritas pengembangan tersebut antara lain: Kepadatan penduduk, klasifikasi wilayah (urban high, urban medium, urban low, peri urban, dan rural), karakteristik tata guna lahan/ Central of Business Development (CBD) serta Resiko Kesehatan Lingkungan.

Selanjutnya dari kriteria tersebut di atas kemudian dibuat suatu peta layanan yang menggambarkan kebutuhan pilihan sistem pengelolaan air limbah. Peta tersebut terbagi ke dalam beberapa zona, sekaligus sebagai dasar pengembangan perencanaan jangka panjang pengelolaan air limbah Kabupaten Enrekang. Target pencapaian akses air limbah domestik Kabupaten Enrekang pada tahun 2020 adalah 93% dimana pengembangan sistem *on-site* sebesar 91% dan sistem *off-site* 2%.

Berdasarkan kriteria yang ada dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM), wilayah pengembangan pelayanan persampahan dapat diidentifikasi. Ada 2 (dua) kriteria utama dalam penetapan prioritas penanganan persampahan saat ini yaitu; 1). Tata guna lahan/klasifikasi wilayah : komersial/ Central of Business Development (CBD), pemukiman, fasilitas umum, terminal, dsb; 2). Kepadatan penduduk. Skenario pencapaian sasaran pengelolaan persampahan lebih fokus kepada pengurangan volume sampah yang diangkut ke TPA dengan dikembangkannya fasilitas reduksi sampah.

Lingkup area perencanaan saluran drainase merupakan wewenang dan tanggung jawab Kabupaten. Tetapi, keterkaitannya dengan sistem yang lebih luas di atasnya maka dipandang perlu dintegrasikan dengan Pemerintah Provinsi, Pusat, atau institusi yang bertanggung jawab atas daerah aliran sungai (DAS) terkait. Pencapaian sasaran pada tahun 2020 berkurangnya area genangan hingga 100%. (*Lihat Tabel 3.8. Skenario Pencapaian Sasaran*)

Tabel 3.8.
Skenario Pencapaian Sasaran

Komponen	Tahun						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Air Limbah Domestik		69%	74%	78%	82%	85%	88%
Persampahan Perkotaan		74%	80%	85%	90%	95%	100%
Drainase Perkotaan		72%	75%	80%	85%	90%	95%

Sumber: Hasil Kajian Pokja Sanitasi Kabupaten Enrekang tahun 2016

3.3. Kemampuan Pendanaan Sanitasi Daerah

Faktor penting lain yang sangat menentukan penentuan sistem dan cakupan pelayanan sanitasi adalah faktor pembiayaan yang sangat tergantung pada kemampuan keuangan daerah. Berdasarkan kebutuhan dan merujuk pada dokumen APBD 5 tahun terakhir, maka Pokja Sanitasi Kabupaten Enrekang melakukan proyeksi dan perhitungan tentang pendanaan sanitasi Kabupaten Enrekang 5 tahun kedepan.

Kajian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran jelas mengenai kemampuan daerah dalam pendanaan sanitasi sebagaimana yang dimaksudkan dalam dokumen ini. Untuk mendapatkan gambaran tersebut, maka analisis difokuskan pada aspek belanja dalam APBD Kabupaten Enrekang.

Perkiraan kebutuhan pendanaan sanitasi untuk tahun 2017-2020 diproyeksikan berdasarkan asumsi bahwa proses pembangunan sanitasi

diupayakan mengalami percepatan dengan indeks kenaikan proporsi anggaran mengikuti rata-rata progres pertumbuhan yang terjadi dalam kurun waktu masa penganggaran tahun 2012-2016. Dalam masa penganggaran tahun 2012-2016, pertumbuhan rata-rata belanja APBD murni untuk sanitasi mencapai 10,2%. Pertumbuhan pendanaan yang tinggi tersebut diakibatkan adanya kenaikan anggaran yang cukup besar pada tahun 2016 dengan proporsi anggaran APBD murni sanitasi terhadap belanja langsung sebesar 1,6%. Untuk mencapai percepatan pembangunan sanitasi, perkiraan besaran komitmen pendanaan sanitasi tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 mencapai Rp.52.805.450.000. *(Lihat Tabel 3.9. Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Enrekang untuk Sanitasi dan Tabel 3.10. Perkiraan Besaran Pendanaan Sanitasi Ke Depan).*

Proyeksi kenaikan APBD murni terhadap sanitasi didasari pada pertumbuhan pengalokasian anggaran sanitasi 5 tahun terakhir dari belanja langsung APBD. Berdasarkan alokasi anggaran sanitasi diperkirakan besaran pendanaan APBD Kabupaten Enrekang untuk kebutuhan operasional/pemeliharaan aset sanitasi terbangun hingga tahun 2020 khususnya pada sub sektor persampahan sebesar Rp.2.031.572.300. *(Lihat Tabel 3.11. Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Enrekang untuk Operasional/Pemeliharaan Sanitasi dan Tabel 3.12. Perkiraan besaran pendanaan APBD Kabupaten Enrekang untuk kebutuhan operasional/pemeliharaan aset sanitasi terbangun hingga tahun 2020)*

Kemampuan daerah untuk berkomitmen dalam penganggaran sanitasi diproyeksikan 2,5 % pada tahun 2020 dari belanja langsung Kabupaten Enrekang. Salah satu strategi Pokja Sanitasi dalam pemenuhan kebutuhan

pendanaan sanitasi adalah mencari alternatif sumber pendanaan diluar APBD Kabupaten. *(Lihat Tabel 3.13. Perkiraan Kemampuan APBD Kabupaten Enrekang dalam Mendanai Program/Kegiatan SSK).*

Tabel 3.9.
Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Enrekang untuk Sanitasi

No	Uraian	Belanja Sanitasi (Rp.)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Belanja Sanitasi (1.1+1.2+1.3)	3.112.087.000	3.134.754.000	3.300.254.000	5.279.228.600	5.755.913.000	21,2
1.1	Air Limbah Domestik	145.000.000	113.680.000			155.752.000	1,9
1.2	Sampah Rumah Tangga	1.890.529.000	1.151.074.000	1.245.416.000	2.674.260.000	3.190.161.000	17,2
1.3	Drainase Perkotaan	1.076.558.000	1.870.000.000	2.054.838.000	2.604.968.600	2.410.000.000	31,0
2	Dana Alokasi Khusus (2.1+2.2+2.3)	1.810.638.000	2.375.977.400	3.660.743.000	3.688.231.000	3.826.056.000	27,8
2.1	DAK Sanitasi	969.858.000	963.976.400	1.684.793.000	2.084.694.000	2.389.786.000	36,6
2.2	DAK Lingkungan Hidup	840.780.000	1.412.001.000	1.975.950.000	1.603.537.000	1.436.270.000	17,7
2.3	DAK Perumahan dan Permukiman		-				
3	Pinjaman/Hibah Untuk Sanitasi		-			-	
Belanja APBD Murni Untuk Sanitasi (1+2+3)		4.922.725.000	5.510.731.400	6.960.988.000	8.967.459.600	9.581.969.000	23,7
Total Belanja Langsung		226.740.459.952	256.017.424.285	305.457.963.632	386.772.977.389	597.092.542.465	40,8
% APBD Murni Terhadap Belanja Langsung		2,2 %	2,2 %	2,3 %	2,3 %	1,6 %	
Komitmen Pendanaan APBD untuk pendanaan sanitasi ke depan (% terhadap belanja langsung ataupun penetapan nilai absolut)							2,5 %

Sumber: Hasil Perhitungan Pokja Sanitasi dari APBD Tahun 2012-2016

Tabel 3.10.
Perkiraan Besaran Pendanaan Sanitasi Ke Depan

No	Uraian	Perkiraan Belanja Murni Sanitasi (Rp.)					Total Pendanaan
			2017	2018	2019	2020	
1	Perkiraan Belanja Langsung		453.784.000.000	500.069.968.000	551.077.104.700	607.286.969.400	2.112.218.042.000
2	Perkiraan APBD Murni Untuk sanitasi		10.147.305.000	10.745.996.000	11.380.009.000	12.051.430.000	44.324.741.000
3	Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi		11.344.600.000	12.501.749.000	13.776.927.000	15.182.174.000	52.805.450.000

Sumber: Hasil Kajian Pokja Sanitasi Kabupaten Enrekang Tahun 2016

Tabel 3.11.
Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Enrekang untuk Operasional/Pemeliharaan Sanitasi

No	Uraian	Belanja (Rp.)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2012	2013	2014	2015	2016	
1	Belanja Sanitasi						
1.1	Air Limbah Domestik						
1.1.1	Biaya Oprasional/Pemeliharaan (justified)						
1.2	Sampah Rumah Tangga						
1.2.1	Biaya Oprasional/Pemeliharaan (justified)	252.151.000	345.000.000	423.899.000	612.065.000	450.000.000	19,6
1.3	Drainase Perkotaan						
1.3.1	Biaya Oprasional/Pemeliharaan (justified)						

Sumber : : Hasil Perhitungan Pokja Sanitasi dari APBD Kabupaten Enrekang Tahun 2012-2016

Tabel 3.12.
Perkiraan Besaran Pendanaan APBD Kabupaten Enrekang untuk Kebutuhan Operasional/Pemeliharaan Aset Sanitasi Terbangun hingga Tahun 2020

No	Uraian	Biaya Operasional/Pemeliharaan (Rp.)					Total Pendanaan
			2017	2018	2019	2020	
1	Belanja Sanitasi						
1.1	Air Limbah Domestik						
1.1.1	Biaya Oprasional/Pemeliharaan (justified)						
1.2	Sampah Rumah Tangga						
1.2.1	Biaya Oprasional/Pemeliharaan (justified)		472.050.000	495.180.400	519.444.900	544.897.000	2.031.572.300
1.3	Drainase Perkotaan						
1.3.1	Biaya Oprasional/Pemeliharaan (justified)						

Sumber : Hasil Kajian Pokja Sanitasi Kabupaten Enrekang Tahun 2016

Tabel 3.13.
Perkiraan Kemampuan APBD Kabupaten Enrekang dalam Mendanai Program/Kegiatan SSK

No	Uraian	Pendanaan (Rp.)					Total Pendanaan
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Perkiraan Kebutuhan Operasional/Pemeliharaan		472.050.000	495.180.400	519.444.900	544.897.000	2.031.572.300
2	Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi		10.147.305.000	10.745.996.000	11.380.009.000	12.051.430.000	44.324.741.000
3	Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi		11.344.600.000	12.501.749.000	13.776.927.000	15.182.174.000	52.805.450.000
4	Kemampuan Mendanai SSK (APBD Murni) (2-1)		9.702.255.000	10.250.887.600	10.860.564.100	11.506.533.000	42.320.239.700
5	Kemampuan Mendanai SSK (Komitmen) (3-1)		10.872.550.000	12.006.568.600	13.257.482.100	14.637.277.000	50.773.877.700

Sumber: Hasil Kajian Pokja Sanitasi Kabupaten Enrekang Tahun 2016

BAB 4

STRATEGI PENGEMBANGAN SANITASI

4.1. Air Limbah Domestik

Pengembangan sistem pengelolaan air limbah yang sesuai dengan kondisi lingkungan di kabupaten Enrekang sangat penting untuk dilakukan. Pencapaian target pelayanan 100% akses pengelolaan air limbah ditahun 2021 membutuhkan strategi yang tepat.

Strategi untuk mencapai visi sanitasi dan melaksanakan misi sanitasi, dirumuskan berdasarkan kondisi terkini dari pengelolaan air limbah domestik dimana strategi yang digunakan adalah mengatasi kelemahan untuk meraih peluang. Penentuan Strategi pengembangan sanitasi dilakukan pendekatan kualitatif menggunakan analisis SWOT (*Strenght, Weakness, Opportunity, Threath*). Strategi pengembangan diturunkan dengan mempertimbangkan baik kondisi internal maupun eksternal dari seluruh masyarakat yang terkait dengan pengembangan Sanitasi.

Faktor-faktor penentu kondisi internal menggambarkan kekuatan (*strenght*) dan kelemahan (*weakness*) dari para pelaku, kondisi alam, ekonomi, kelembagaan dan sosial budaya yang ada di Kabupaten Enrekang. Faktor-faktor penentu kondisi eksternal menggambarkan peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*) yang dihadapi oleh masyarakatdalam pelaksanaan pengembangan sanitasi (*Soekartawi, 1995*).

Kondisi faktor internal dan eksternal tersebut di atas, berdasarkan identifikasi masalah sebagaimana disesuaikan dengan pengembangan sanitasi serta peluang dan prospek masyarakat, maka untuk menetapkan Strategi pengembangan sanitasi dapat menggunakan Analisis SWOT dapat diformulasikan dalam bentuk Tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1 Posisi Pengelolaan Komponen Air Limbah Domestik

INTERNAL		EKSTERNAL	
KEKUATAN (STRENGTHS)		PELUANG (OPPORTUNIES)	
1	Adanya dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, dll)	1	Tersedianya anggaran dari Pemerintah Pusat.
2.	Adanya Rancangan RTRW	2	Tersedianya anggaran dari Pemerintah Provinsi
3.	Adanya pembangunan MCK	3	Adanya LSM Lingkungan
4.	Adanya SKPD yang terkait sanitasi (pengelolaan)	4	Peluang kerjasama dengan Swasta dalam pengelolaan limbah
5.	Adanya media komunikasi yang bisa digunakan dalam sosialisasi	5	Adanya peluang kerjasama dengan media komunikasi
7.	Adanya pokja PKP dan Forum PKP	6	Masih adanya perilaku gotong royong dalam masyarakat
8.	Adanya dokumen khusus sanitasi Mulai ada perhatian pemda dalam pembangunan sarana sanitasi	7	Adanya sistem Komunal sebagai alternatif pengelolaan limbah
KELEMAHAN (WEAKNESSES)		ANCAMAN (THREATS)	
1	Belum adanya PERDA tentang Air Limbah	1	Rendahnya Kesadaran Masyarakat akan pentingnya pengelolaan air limbah
2	Belum adanya masterplan khusus air limbah	2	Kurangnya program pengelolaan Air Limbah yang berbasis masyarakat
3	APBD yang terbatas	3	Pengelolaan air limbah belum dijadikan sebagai prioritas
4	SDM pengelolaan Air Limbah belum memadai	4	Masih ada desa yang belum stop BABS
5	Sarana dan prasarana pengelolaan belum memadai	5	Tingginya perentase penyakit yang diakibatkan sanitasi buruk
6	Sistem jaringan pengumpul belum ada	6	Belum semua industri menggunakan IPAL.

Strategi untuk mencapai visi sanitasi dan melaksanakan misi sanitasi, dirumuskan berdasarkan kondisi terkini dari pengelolaan air limbah domestik dimana strategi yang digunakan adalah mengatasi kelemahan untuk meraih peluang antara lain :

Strategi 1 : **Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana airlimbah sistem setempat (on site) diperkotaan dan perdesaan melaluisistem komunal.**

Kepemilikan jamban yang sehat dengan tangki septik yang aman di Kabupaten Enrekang baru mencapai 86,9 % , sehingga masih perlu dipacu untuk peningkatan akses sarana air limbah baik dengan cara memiliki secara individu maupun secara komunal, sehingga perlu adanya pembangunan IPLT dalam pelayanan terhadap pengolahan akhir lumpur tinja yang memenuhi baku mutu yang telah di tentukan dan peran aktif masyarakat dalam pemeliharaan prasarana air limbah yang telah ada.

Strategi 2 : **Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air limbah permukiman dengan cara merubah perilaku dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan air limbah permukiman.**

Partisipasi masyarakat akan meningkat dalam pengelolaan air limbah permukiman apabila mereka mengetahui dampak buruk akibat pengelolaan limbah yang salah. Strategi ini dilakukan dengan mengubah cara pandang yang ada di masyarakat dan menginformasikan tentang cara pengelolaan air limbah yang baik bagi kesehatan lingkungan.

Strategi 3 : **Menyusun perangkat peraturan perundangan didaerah yang mendukung penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman.**

Pengembangan perangkat peraturan perundangan penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman sangat dibutuhkan sebagai landasan hukum dan gerak dari pemerintah daerah dalam pengelolaan air limbah permukiman.

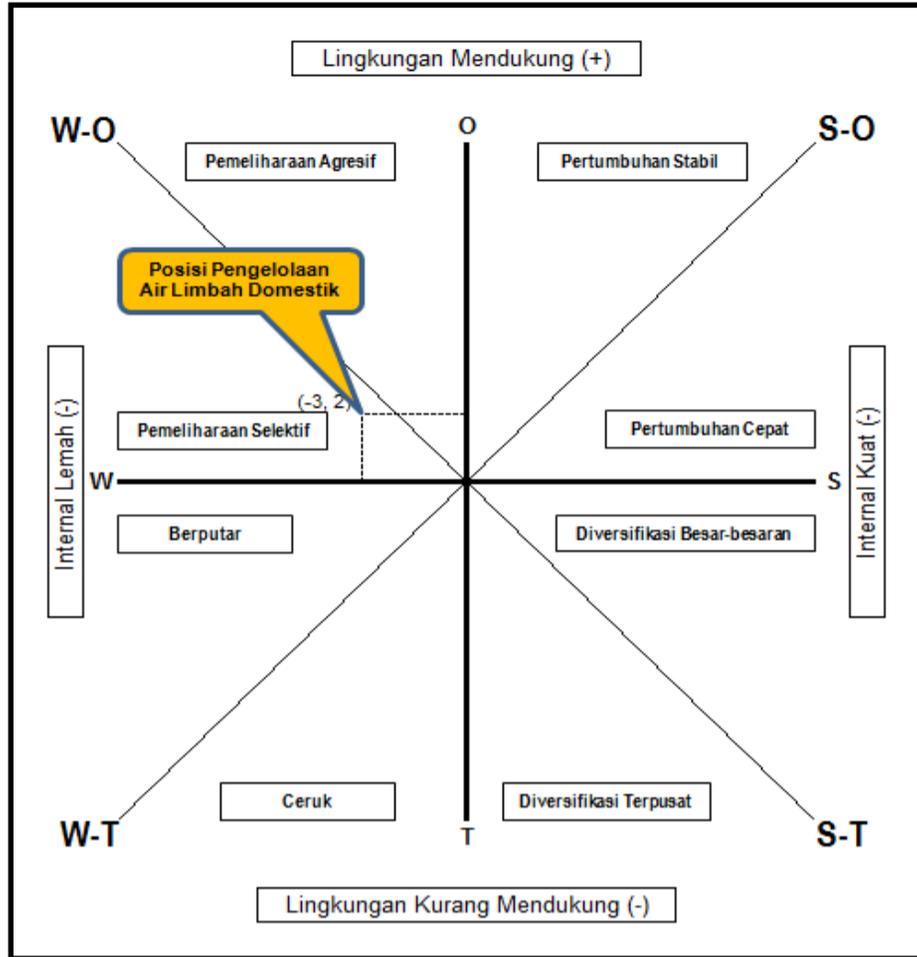
Strategi 4 : **Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas personil pengelolaan air limbah permukiman.**

Kelembagaan dari pemerintah daerah yang khusus mengelola air limbah domestic selama ini belum ada. Demikian juga kelembagaan yang ada dimasyarakat belum terbangun maka perlu dibentuk UPTD pengelolaan IPAL Komunal dan MCK + Sambungan Rumah. Selain itu dituntut pula peran aktif masyarakat dalam pemeliharaan prasarana air limbah yang ada.

Strategi 5 : **Menjaga komitmen pihak swasta dan lembaga donor baik yang sudah berpartisipasi selama ini atau pun yang belum pernah terlibat.**

Rendahnya proporsi anggaran APBD murni sanitasi terhadap belanja langsung menuntut adanya sumber alternatif pendanaan dengan keterlibatan pihak swasta dan lembaga donor dalam pengelolaan air limbah domestik.

Untuk sub sektor air limbah domestik, pengelolaan sanitasi Kabupaten Enrekang berdasarkan hasil pembobotan dan skoring analisis SWOT menunjukkan berada pada posisi W-O atau berada pada posisi kuadran 2. *(Lihat Gambar 4.1. Posisi Pengelolaan Air Limbah Domestik)*



Gambar 4.1. Posisi Pengelolaan Air Limbah Domestik

4.2. Persampahan

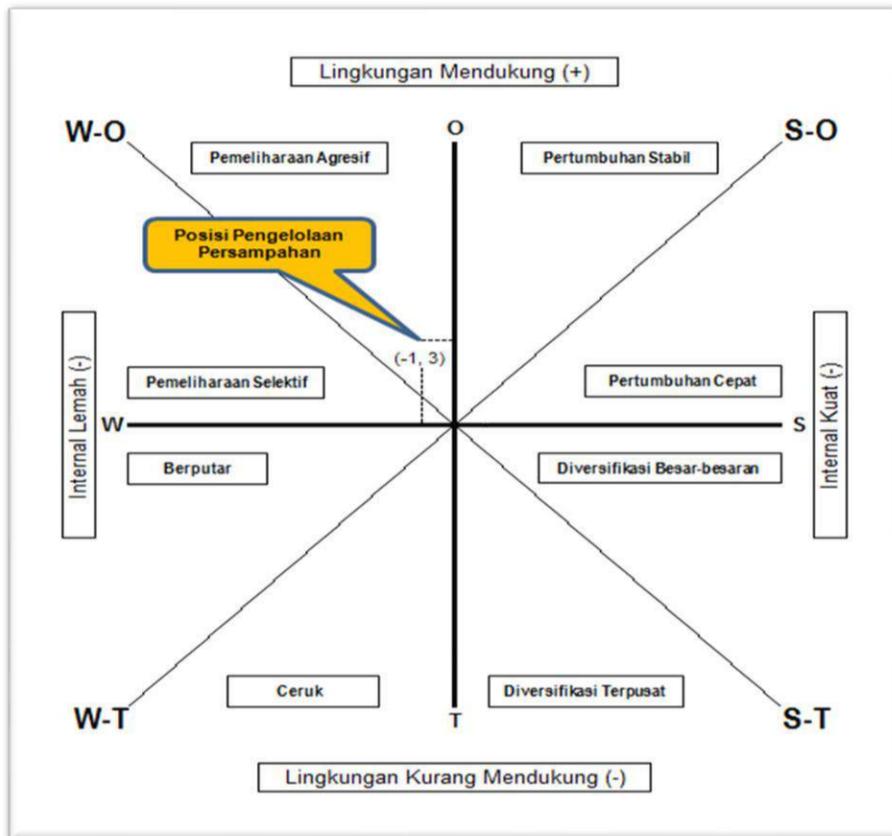
Analisis Lingkungan Strategis dengan Faktor-faktor penentu kondisi internal dan eksternal dengan mengidentifikasi dan merumuskan isu-isu strategis yang menggambarkan kekuatan (*strenght*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*) yang dihadapi oleh masyarakat dalam pelaksanaan pengembangan sanitasi (Soekartawi, 1995) sebagai alat formulasi, maka untuk menetapkan Strategi pengembangan sanitasi dapat menggunakan Analisis SWOT dapat diformulasikan dalam bentuk Tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4.2 Posisi Pengelolaan Persampahan

INTERNAL		EKSTERNAL	
KEKUATAN (STRENGTHS)		PELUANG (OPPORTUNIES)	
1	Adanya perda retribusi pengelolaan persampahan	1	Tersedianya anggaran dari Pemerintah Provinsi dan Pusat.
2.	Adanya Lembaga/SKPD pengelola persampahan	2	Adanya peluang kerjasama dengan swasta dalam pengelolaan sampah
3.	Adanya SKPD yang melakukan monitoring dan pengontrolan kualitas lingkungan akibat produk sampah	3	Adanya LSM
4.	Adanya Pokja PKP dan Forum PKP	4	Adanya peluang kerjasama dengan media komunikasi
5.	Adanya Dasar pengelolaan sampah dengan metode 3R	5	Sampah bisa dijadikan produk yang memiliki nilai jual
6.	Adanya sarana dan prasarana persampahan	6	Sudah ada kelompok pengumpul sampah di masyarakat
7.	Prestasi ditingkat nasional mengenai pengelolaan persampahan (ADIPURA)	7	Adanya teknologi pengelolaan persampahan
8.	Adanya TPA dengan sanitary landfill		
9.	Adanya rancangan Perda RTRW		
KELEMAHAN (WEAKNESSES)		ANCAMAN (THREATS)	
1	Masyarakat yang kurang aktif dalam pengelolaan persampahan	1	Rendahnya Kesadaran Masyarakat akan kebersihan lingkungan
2	APBD yang terbatas	2	Secara umum pengorganisasian pengepul masih lemah
3	Tidak ada pemungutan retribusi sampah	3	Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan masih minim
4	Kondisi Sarana dan Prasarana yang kurang memadai	4	Masih lemahnya pengetahuan masyarakat tentang teknologi pengelolaan persampahan
5	Sistem Persampahan yang belum sistematis, terpadu dan menyeluruh	5	Pembangunan sarana persampahan belum dijadikan prioritas
6	SDM Personil persampahan masih minim	6	Masih banyak desa yang belum tercover oleh mobil sampah
7	Belum ada perda yang mengatur mengenai pengelolaan persampahan secara menyeluruh	7	Belum adanya pendistribusian untuk produksi industri sampah
8	Regulasi yang mengatur keterlibatan pihak swasta belum ada	8	Tingginya persentase penyakit yang diakibatkan
9	Jangkauan pelayanan yang terbatas	9	

		sanitasi buruk Belum semua industri memiliki sistem pengelolaan sampah
--	--	---

Berdasarkan hasil pembobotan dan skoring analisis SWOT (lampiran 2), pengelolaan persampahan Kabupaten Enrekang saat ini berada di kuadran 2. (Lihat Gambar 4.2. Posisi Pengelolaan Persampahan)



Gambar 4.2. Posisi Pengelolaan Persampahan

Dengan berada pada posisi W-O, strategi yang akan dikembangkan yaitu bagaimana mengatasi kelemahan untuk meraih peluang yang ada. Dimana, membutuhkan strategi dan usaha-usaha yang lebih konkrit dalam menangani pengelolaan persampahan di Kabupaten Enrekang dengan menuntut tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, karena tanpa hal itu tak akan mungkin tercapai seperti yang diharapkan. Ada 5 strategi yang telah dirumuskan untuk mencapai visi sanitasi Kabupaten Enrekang dalam pengelolaan persampahan, antara lain adalah :

Strategi 1 : ***Membuat dokumen perencanaan persampahan yang komprehensif dan terintegrasi didukung dengan kebijakan daerah.***

Khusus pada kelembagan Dinas Lingkungan Hidup, hal yang dihadapi dalam pengelolaan persampahan tentang kesesuaian dengan implementasinya, Ketersediaan kebijakan daerah tentang pengelolaan persampahan sangat mendukung pencapaian tujuan meningkatkan kinerja kelembagaan dalam pengelolaan persampahan sesuai Jastrada Persampahan Kab. Enrekang

Strategi 2 : ***Meningkatkan peran aktif dan pemahaman masyarakat dalam pengolahan sampah 3R (Reduce-Reuse-Recycle).***

Proses pengolahan setempat cenderung membuang sampah disembarang tempat dan melakukan pembakaran sampah secara terbuka, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga dengan memberikan bimbingan pengolahan sampah konsep 3R adalah salah satu upaya untuk mengurangi timbulan sampah dari sumbernya.

Strategi 3 : ***Membangun fasilitas reduksi sampah yang berasal dari rumah tangga, pasar dan terminal.***

Peningkatan laju timbulan sampah perkotaan 1,27% pertahun sangat berdampak pada kapasitas dan umur rencana TPA, mengurangi volume timbulan sampah ke TPA merupakan salah satu tujuan dalam strategi sanitasi kota tahun ini. Pengembangan fasilitas reduksi sampah dengan bangunan 3R dinilai sangat efektif. Meskipun telah dilakukan komposting di

TPS 3R Kelurahan Kecamatan yang menjadi kendala adalah dalam proses pemasaran kompos tersebut sehingga mempengaruhi kualitas dan tingkat pengelolaan sampah. Diperlukan fungsi fasilitasi dari pemerintah kota dalam memasarkan produk daur ulang sampah.

Strategi 4 : ***Penguatan kelembagaan dalam memelihara prasarana persampahan yang telah terbangun.***

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kinerja melalui Tupoksi SKPD, manajemen teknis dan OM kelembagaan berupa pelatihan dan bimbingan. Tuntutan peningkatan kapasitas dari sejumlah kelembagaan pembangunan seperti PKK, Posyandu dan Karang Taruna agar bisa mengimbangi permasalahan dalam pengelolaan persampahan yang semakin dinamis dan kompleks. Selain itu keterlibatan perempuan perlu ditingkatkan yang merupakan pemanfaat sektor sanitasi yang dominan, diantaranya melalui pemberdayaan perempuan dengan mendorong terbentuknya pemberdayaan KSM perempuan.

Strategi 5 : ***Menjaga komitmen pihak swasta dan lembaga donor baik yang sudah berpartisipasi selama ini ataupun yang belum pernah terlibat.***

Keterlibatan pihak swasta dalam pembangunan sanitasi di Kabupaten Enrekang belum signifikan. Di Kabupaten Enrekang para pengepul dan pemulung yang memanfaatkan jenis sampah padat berupa: besi tua, plastik, karet, botol dan kertas untuk dijadikan sebagai peluang

usaha. Jumlah pengepul di Kabupaten Enrekang teridentifikasi sebanyak 18 unit usaha. Khusus di Kabupaten Enrekang, sampah yang dikelola oleh pemulung maupun pengepul adalah 547 m³/bulan atau sekitar 18,23 m³/hari.

Peluang usaha ini terbuka lebar sehingga pemerintah kota dapat memfasilitasi antara pemilik modal perbankan dan pihak swasta lainnya dengan para pelaku atau peminat bisnis dalam pengelolaan persampahan. Selain fungsi fasilitasi, mencari sumber pendanaan lain berupa dana sosial dari pihak swasta perlu ditingkatkan.

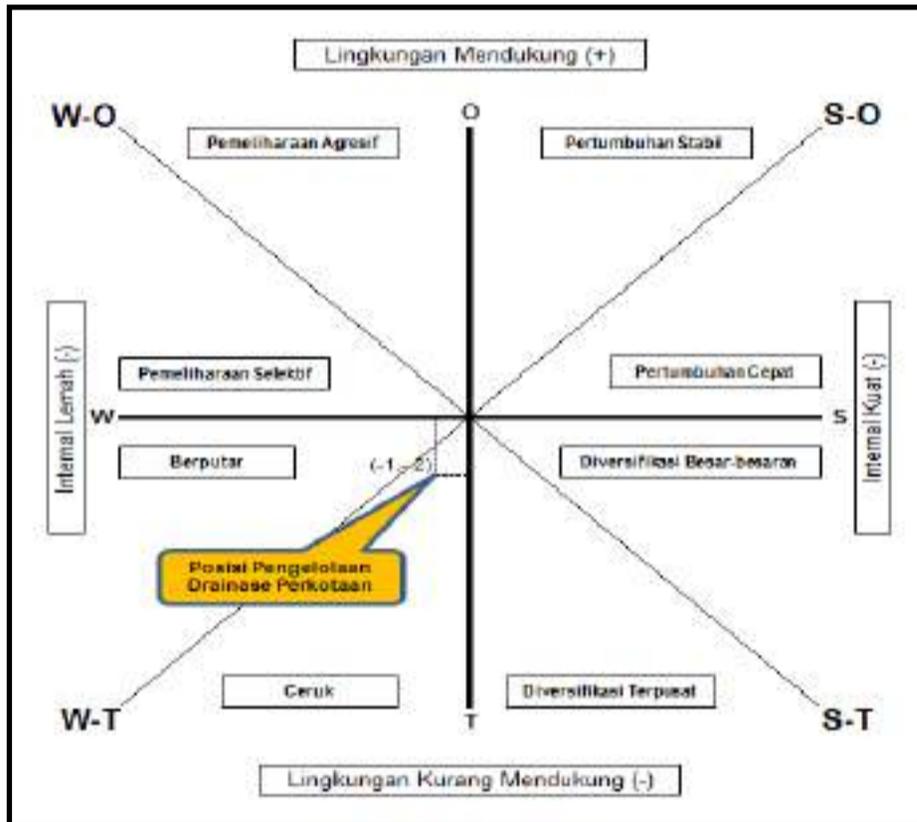
4.3. Drainase Perkotaan

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan perkotaan dan permasalahan banjir yang makin meningkat pula maka pengelolaan drainase perkotaan harus dilaksanakan secara menyeluruh dimulai dari tahap perencanaan, konstruksi, operasi dan pemeliharaan yang ditunjang peningkatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat perkotaan. Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan harus memperhatikan fungsi drainase perkotaan sebagai prasarana kota yang didasarkan pada konsep berwawasan lingkungan. Konsep ini berkaitan dengan upaya konservasi sumber daya air yang pada prinsipnya adalah pengendalian air hujan dengan memaksimalkan peresapan ke dalam tanah dan meminimalkan aliran permukaan (limpasan). Analisis Lingkungan Strategis dengan Faktor-faktor penentu kondisi internal dan eksternal dengan mengidentifikasi dan merumuskan isu-isu strategis yang menggambarkan kekuatan (*strenght*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*) yang dihadapi oleh masyarakat dalam pelaksanaan pengembangan sanitasi (Soekartawi, 1995) sebagai alat formulasi, maka untuk menetapkan Strategi pengembangan sanitasi dapat menggunakan Analisis SWOT dapat diformulasikan dalam bentuk Tabel 4.3 sebagai berikut :

Tabel 4.3 Posisi Pengelolaan Drainase Perkotaan

INTERNAL		EKSTERNAL	
KEKUATAN (STRENGTHS)		PELUANG (OPPORTUNIES)	
1	Adanya Pokja PKP	1	Adanya peluang untuk mendapatkan bantuan baik dari provinsi maupun pusat swsta.
2.	Adanyanya lembaga yang mengelola (Dinas PU TR)		Secara teknis tidak sulit dalam pembangunan sarana drainase (SDM cukup)
3.	Drainase hal yang “populer” dalam usulan perencanaan pembangunan	2	Masyarakat mulai peduli dalam penyediaan drainase di depan rumah masing-masing
4.	Adanya Dok. RTRW	3	Banyak pengusulan dari masyarakat melalui musrenbangdes
5.	Tersedianya media lokal untuk sosialisasi	4	Dukungan dari Pemerintah Pusat/Provinsi melalui APBN/APBD I
6.	Adanya Sarana dan Prasarana Saluran Drainase	5	Perencanaan termuat dalam dokumen RPJMN dan RPJMD
		6	
KELEMAHAN (WEAKNESSES)		ANCAMAN (THREATS)	
1	APBD yang sangat terbatas	1	Banjir yang sering terjadi
2	Belum adanya masterplan drainase	2	Masyarakat masih membuang sampah ke drainase
3	Kondisi sarana prasarana kurang memadai	3	Rumah masyarakat di pinggiran sungai
4	Belum adanya keterlibatan pihak swasta	4	Developer kurang memperhatikan masalah drainase
5	SDM pengelola Drainase masih minim	5	Jumlah penduduk miskin yang tinggi
6	Sarana terbangun tidak terpadu dan menyeluruh dalam fungsi dan pengelolaannya	6	Lahan dengan kontur yang beragam
7	Perda yang mengatur belum ada	7	Lokasi perumahan yang berjauhan dan tidak merata
8	Mekanisme sanksi bagi masyarakat yang membuang sampah di drainase belum ada	8	Perubahan akibat perkembangan pemukiman
	Sosialisasi masih kurang.	9	Kurangnya peluang kerjasama dengan pihak swasta

Secara internal, pengelolaan drainase Kabupaten Enrekang masih memerlukan perbaikan, meskipun resiko genangan relatif kecil. Hal ini ditunjukkan dengan hasil analisis SWOT pengelolaan drainase berada pada kuadran 3 yaitu posisi W-T. (Lihat Gambar 4.3. Posisi Pengelolaan Drainase Perkotaan)



Gambar 4.3. Posisi Pengelolaan Drainase Perkotaan

Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang sangat pesat, permasalahan drainase semakin meningkat pula pada umumnya melampaui kemampuan penyediaan prasarana dan sarana. Akibatnya permasalahan banjir atau genangan semakin meningkat pula. Strategi yang harus dilaksanakan adalah mengatasi kelemahan untuk mengantisipasi setiap ancaman. Dengan uraian kondisi tersebut, maka Pokja PKP Kabupaten Enrekang telah merumuskan beberapa strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi 1 : ***Membuat dokumen perencanaan drainase yang komprehensif dan terintegrasi didukung dengan kebijakan daerah***

Arahan pola dan tata ruang pengelolaan drainase, pada prinsipnya perlu di implementasikan menjadi produk hukum dan perundang-undangan, seperti kebijakan tentang pelarangan penggunaan pembangunan di atas drainase, pembuangan sampah kedalam drainase, dan lalu lintas kendaraan berat yang dapat merusak struktur bangunan drainase dan dengan adanya dokumen perencanaan drainase seperti master plan drainase, sistem drainase menjadi sebuah satu kesatuan antara wilayah pengunungan dan wilayah dataran rendah sehingga dapat meningkatkan fungsi drainase untuk mengatasi genangan.

Strategi 2 : ***Pembangunan dan pemeliharaan sistem jaringan drainase yang layak sesuai fungsinya sebagai pembuangan limbah air hujan.***

Terjadinya pendangkalan dan penyempitan jaringan drainase makro akibat laju erosi permukaan dan sedimentasi yang berakibat penyusutan penampungan air di saluran drainase dan kondisi konstruksi drainase yang merupakan konstruksi bangunan lama sehingga ada beberapa bangunan drainase yang sudah rusak menuntut pembangunan dan pemeliharaan drainase secara rutin.

Strategi 3 : ***Penguatan kelembagaan dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sistem drainase lingkungan***

Tupoksi mengenai pengelolaan drainase pada Dinas PU-TR berada pada Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang, memiliki peran penting dalam pengelolaan sistem drainase disamping itu keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan drainase perlu ditingkatkan untuk perawatan prasarana drainase yang telah dibangun dan peningkatan pembangunan drainase berbasis masyarakat dengan pola pemberdayaan masyarakat. Dimana, komponen sampah padat akibat perilaku masyarakat itu sendiri dengan membuang sampah dan limbah lainnya yang dapat mengurangi daya alir air sesuai kapasitas normal dan jika terjadi hujan maka drainase menjadi tersumbat.

BAB 5
PROGRAM, KEGIATAN DAN
INDIKASI PENDANAAN SANITASI

5.1. Ringkasan

Program dan kegiatan percepatan pembangunan sanitasi Kabupaten Enrekang disusun untuk mengatasi masalah sanitasi di Kabupaten Enrekang dalam 5 tahun ke depan. Indikasi kebutuhan biaya dan sumber pendanaan pengembangan sanitasi/Air Limbah dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 Kabupaten Enrekang adalah sebesar Rp. 103.550.000.000,- dengan porsi pendanaan lebih besar sebagai prioritas penanganan utama. (Lihat Tabel 5.1. Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi Untuk 5 Tahun).

Tabel 5.1.

**Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya
Pengembangan Sanitasi Untuk 5 Tahun**

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran (x Rp. 1 Juta)					Total Anggaran
		2022	2023	2024	2025	2026	
1	Air Limbah Domestik	9.590	9.250	43.780	24.300	16.630	103.550
2	Persampahan	8.560	15.040	14.850	19.880	13.420	71.750
3	Drainase	4.025	3.928	3.128	4.500	4.900	20.481
Jumlah		22.175	28.218	61.758	48.680	34.950	195.781

Sumber : Hasil Analisa Pokja Sanitasi Tahun 2022

Tabel 5.2 Hasil Perhitungan Funding Gap untuk 5 Tahun

Uraian	2.021	2.022	2.023	2.024	Total Anggaran
Kebutuhan pendanaan	17.840.797.200	19.570.800.000	20.830.800.000	21.815.800.000	21.875.800.000
kemampuan dana	12.927.749.302	18.423.016.614	26.870.679.978	39.847.925.021	59.774.734.820
funding gap	4.913.047.898	1.147.783.386	6.039.879.978	18.032.125.021	37.898.934.820
gap %	27,54	5,86	-28,99	-82,66	

Pendanaan yang bersumber dari pemerintah yaitu APBD Kota, APBD Provinsi dan APBN kebutuhan anggaran sanitasi Kabupaten Enrekang sebesar Rp. 195.781.000.000,- hingga tahun 2026. Peran swasta (CSR) dalam pendanaan pengembangan Persampahan di Kabupaten Enrekang hingga 5 tahun kedepan sebesar Rp. 1.490.000.000,- (Lihat Tabel 5.2. Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi Untuk 5 Tahun per Sumber Anggaran).

Tabel 5.3.

Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi Untuk 5 Tahun per Sumber Anggaran

No	Sumber Anggaran	Tahun Anggaran (x Rp. 1 Juta)					Total Anggaran
		2022	2023	2024	2025	2026	
A.	Pemerintah						
1	APBD Kota	15.145	15.548	19.930	22.150	19.140	91.913
2	APBD Provinsi	3.290	5.790	25.500	11.390	6.610	52.580
3	APBN	800	3.940	6.100	7.790	2.200	20.830
4	DAK	2.770	2.770	3.000	3.150	5.850	17.540
	Jumlah A	6.230	22.005	28.048	54.530	44.480	33.800
B.	Non-Pemerintah						0
1	CSR Swasta	170	170	4.100	4.200	1.150	9.790
2	Masyarakat						0
	Jumlah B	100	170	170	4.100	4.200	1.150
	Total (A + B)	22.175	28.218	58.630	48.680	34.950	192.653

Sumber : Hasil Analisa Pokja Sanitasi Tahun 2022

5.2. Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi Dengan Sumber Pendanaan Pemerintah

5.2.1. APBD Kabupaten Enrekang

Penganggaran sanitasi yang bersumber dari APBD Kota hingga tahun 2026 sebesar Rp.45.860.000.000,- Dimana proporsi penganggaran paling besar pada sub sektor Sanitasi ini, sedangkan untuk sub sector persampahan sebesar Rp.28.700.000.000,- dan Sub Sektor Drainase Rp. 20.481.000.000 (Lihat Tabel 5.3. Rekapitulasi Dengan Sumber Pendanaan APBD Kab. Enrekang)

Tabel 5.4.
Rekapitulasi Dengan Sumber Pendanaan APBD Kabupaten Enrekang

No	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran (x Rp. 1 Juta)					Total Anggaran
		2022	2023	2024	2025	2026	
1	Air Limbah Domestik	6.750	6.300	14.280	9.800	8.730	45.860
2	Persampahan	4.370	5.320	5.650	7.850	5.510	28.700
3	Drainase	4.025	3.928	3.128	4.500	4.900	20.481
Jumlah		15.145	15.548	23.058	22.150	19.140	95.041

Sumber : Hasil Analisa Pokja Sanitasi Tahun 2022

5.2.2. APBD Provinsi

Kebutuhan biaya yang bersumber dari APBD Provinsi untuk pembangunan sanitasi di Kabupaten Enrekang dalam jangka waktu 5 tahun adalah Rp.25.040.000.000. Dimana, untuk penganggaran terbesar pada sub sektor persampahan pendanaan APBD Provinsi dialokasikan untuk kegiatan pembangunan TPS 3R dan Sarana prasarana Persampahan sebesar Rp. 27.540.000.000,- dan sub sektor drainase tidak menganggarkan untuk peningkatan saluran drainase. (Lihat Tabel 5.4. Rekapitulasi Dengan Sumber Pendanaan APBD Provinsi)

Tabel 5.5.

Rekapitulasi Dengan Sumber Pendanaan APBD Provinsi

No	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran (x Rp. 1 Juta)					Total Anggaran
		2022	2023	2024	2025	2026	
1	Air Limbah Domestik	240	350	19.200	4.150	1.100	25.040
2	Persampahan	3.050	5.440	6.300	7.240	5.510	27.540
3	Drainase	0	0	0	0	0	0
Jumlah		3.290	5.790	25.500	11.390	6.610	52.580

Sumber : Hasil Analisa Pokja Sanitasi Tahun 2022

5.2.3. APBN

Pendanaan yang bersumber dari APBN hingga tahun 2026 adalah sebesar Rp.12.530.000.000 dengan sub sektor persampahan Rp. 12.530.000.000,- Dan untuk Sub sector Sanitasi sebesar Rp. 8.300.000.000,- (Lihat Tabel 5.5. Rekapitulasi Dengan Sumber Pendanaan APBN)

Tabel 5.6.
Rekapitulasi Dengan Sumber Pendanaan APBN

No	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran (x Rp. 1 Juta)					Total Anggaran
		2022	2023	2024	2025	2026	
1	Air Limbah Domestik	0	0	3.800	3.800	700	8.300
2	Persampahan	800	3.940	2.300	3.990	1.500	12.530
3	Drainase	0	0	0	0	0	0
Jumlah		800	3.940	6.100	7.790	2.200	20.830

Sumber : Hasil Analisa Pokja Sanitasi Tahun 2022

5.3. Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi Dengan Sumber Pendanaan DAK

5.3.1. DAK

Kegiatan APBN sebahagian di pindahkan ke Pendanaan DAK, Pendanaan yang bersumber dari DAK hingga tahun 2026 adalah sebesar Rp.33.590.000.000,- dengan pendanaan terbesar pada sub sektor persampahan. Berdasarkan pendanaan DAK Penanganan Sampah dengan melakukan pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota. Oleh karenanya, biaya yang dibutuhkan untuk pengembangan Persampahan yang bersumber dari DAK adalah Rp.7.540.000.000 dan pendanaan sub sektor Air Limbah adalah Rp. 16.050.000.000,- . (Lihat Tabel 5.6. Rekapitulasi Dengan Sumber Pendanaan APBN)

Tabel 5.7.
Rekapitulasi Dengan Sumber Pendanaan DAK

No	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran (x Rp. 1 Juta)					Total Anggaran
		2022	2023	2024	2025	2026	
1	Air Limbah Domestik	2.600	2.600	2.700	2.750	5.400	16.050
2	Persampahan	2.770	2.770	3.000	3.150	5.850	17.540
3	Drainase	0	0	0	0	0	0
Jumlah		5.370	5.370	5.700	5.900	11.250	33.590

Sumber : Hasil Analisa Pokja Sanitasi Tahun 2022

5.4. Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi Dengan Sumber Pendanaan Non Pemerintah

5.4.1. Swasta/CSR

Peran swasta/CSR dalam pendanaan pengembangan sanitasi di Kabupaten Enrekang hingga tahun 2026 sebesar Rp.18.090.000.000. Peran swasta dalam 5 tahun terakhir berperan juga dalam Penanganan Sampah dengan melakukan pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota. (Lihat Tabel 5.7. Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Swasta/CSR)

Tabel 5.8.

Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Swasta/CSR

No	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran (x Rp. 1 Juta)					Total Anggaran
		2022	2023	2024	2025	2026	
1	Air Limbah Domestik	0	0	3.800	3.800	700	8.300
2	Persampahan	170	170	4.100	4.200	1.150	9.790
3	Drainase	0	0	0	0	0	0
Jumlah		170	170	7.900	8.000	1.850	18.090

Sumber : Hasil Analisa Pokja Sanitasi Tahun 2022

5.4.2. Masyarakat

Peran masyarakat dalam pendanaan pengembangan sanitasi di Kabupaten Enrekang hingga 5 tahun kedepan tidak dianggarkan (Lihat Tabel 5.8 Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Masyarakat)

Tabel 5.9.

Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Masyarakat

No	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran (x Rp. 1 Juta)					Total Anggaran
		2022	2023	2024	2025	2026	
1	Air Limbah Domestik	0	0	0	0	0	0
2	Persampahan	0	0	0	0	0	0
3	Drainase	0	0	0	0	0	0
Jumlah		0	0	0	0	0	0

Sumber : Hasil Analisa Pokja Sanitasi Tahun 2022

5.5. Antisipasi Funding Gap

Kemungkinan terjadinya Funding Gap bila jumlah anggaran yang dibutuhkan jauh lebih besar daripada yang tersedia. Gap dalam 5 tahun sebesar 154.32% dari total kebutuhan pendanaan sanitasi, dimana pada tahun 2021 Gap mencapai 66.86%. (*Lihat Tabel 5.9. Funding Gap*)

Tabel 5.10.

Funding Gap

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran (x Rp. 1 Juta)					Total Anggaran
		2022	2023	2024	2025	2026	
1	Air Limbah Domestik	9.925	11.150	12.265	13.492	14.841	61.673
2	Persampahan	190	225	248	272	299	1.234
3	Drainase	2.530	2.783	3.062	3.368	3.704	15.447
4	Daftar Tunggu (Funding Gap)	970	4.160	4.400	6.190	2.650	18.370
5	Kebutuhan Pendanaan Sanitasi	15.145	15.548	19.930	22.150	19.140	91.913
6	Gap (%)	6,40	26,76	22,08	27,95	13,85	97,03

Sumber : Hasil Analisa Pokja Sanitasi Tahun 2022

Kesenjangan pendanaan antara kemampuan pemerintah daerah dengan kebutuhan pendanaan sebesar Rp.18.370.000.000,- Kesenjangan pendanaan (Funding Gap) tersebut perlu mendapatkan perhatian agar pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dapat terpenuhi. Strategi untuk mengatasi kesenjangan pendanaan tersebut diantaranya dengan melakukan:

- a. Mengarusutamakan permasalahan sanitasi menjadi kebutuhan mendesak yang harus segera diselesaikan.
- b. Memberikan prioritas penganggaran sehingga persentase pendanaan untuk sektor sanitasi mendapatkan prioritas dalam APBD Kabupaten Enrekang.
- c. Melakukan usaha koordinasi pendanaan ke tingkat provinsi, utamanya dalam penyelesaian permasalahan sanitasi pada kawasan strategis dan wilayah perbatasan kabupaten/kota.

- d. Melakukan usaha koordinasi pendanaan ke tingkat pusat untuk penyelesaian permasalahan sanitasi skala kota.
- e. Melakukan usaha promosi ke pihak swasta untuk memberikan bantuan program CSR dalam upaya penanganan sanitasi.

BUPATI ENREKANG,

MUSLIMIN BANDO